

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM
KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA (KUKESRA)
DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

(Studi Tentang Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan Terhadap Implementasi)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



**Diajukan oleh :
AGUS SETIO WIDODO
NIM. D4E001002**

**Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

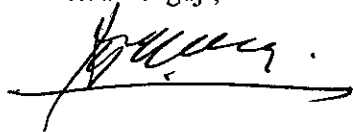
**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA KELUARGA
SEJAHTERA (KUKESRA) DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
PEMALANG
(STUDI TENTANG SIKAP, SUMBER DAYA DAN PENGAWASAN
TERHADAP IMPLEMENTASI)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
AGUS SETIO WIDODO
D4E001002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: 18 September 2002

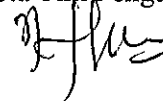
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,

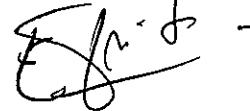


Prof. Drs. Y. Warella, MPA., PhD

Anggota Tim Penguji Lain:

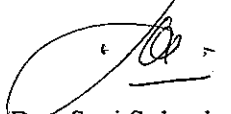


1. Dra. Dyah Hariani, MM



2. Dra. Endang Larasati, Msi

Sekretaris Penguji


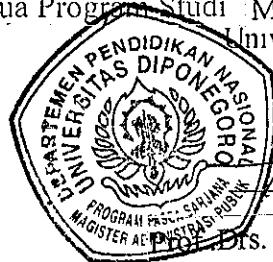


Dra. Susi Sulandari, Msi

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Sain

Tanggal: 18 SEP. 2002

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro
Semarang



Prof. Drs. Y. Warella, MPA., PhD

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2002

AGUS SETIO WIDODO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis yang berjudul “ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA (KUKESRA) DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG (STUDI TENTANG SIKAP, SUMBER DAYA DAN PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA., PhD, selaku Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dra. Susi Sulandari, Msi, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya selama penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. Prasetyo Adhi, selaku Kepala BKKBN Kantor Kabupaten Pemalang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di wilayahnya.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Semarang, Agustus 2002
Penulis,

Agus Setio Widodo

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa implementasi program KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang masih rendah. Kondisi ini tercermin dari tingginya tunggakan KUKESRA yang ada di masyarakat. Ironisnya 65,7% tunggakan itu justru berada pada Kader/ Ketua Kelompok yang berasal dari Keluarga Sejahtera III. Padahal sesuai dengan acuan normatif fasilitas KUKESRA hanya diperuntukkan bagi Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha ekonomi produktif. Mengacu pada temuan selama pra survei paling tidak terdapat tiga faktor yang diduga menjadi penyebab ketidakberhasilan program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. **Pertama**, adalah sikap yang rendah terhadap program tersebut. **Kedua**, adalah sumber daya yang rendah bagi kelancaran program. **Ketiga**, adalah pengawasan yang rendah terhadap pengelolaan dana KUKESRA. Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut kemudian diadakan analisis untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan antara sikap, sumber daya dan pengawasan dengan implementasi program KUKESRA di Kecamatan taman Kabupaten Pemalang.

Hasil pengujian hipotesis melalui analisis regresi dengan bantuan komputer SPSS 10 menemukan bahwa koefisien korelasi (r) adalah 0,363. Nilai ini signifikan untuk ukuran sampel (n) 64 pada tingkat kepercayaan (α) 5%. Sesuai dengan pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi (Sugiyono, 2002: 216) maka nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,363 tergolong dalam kategori hubungan yang rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik hubungan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan dengan Implementasi program KUKESRA di Kecamatan taman Kabupaten pemalang adalah rendah. Adapun koefisien determinasi (r^2) yang didapat adalah 0,132. Artinya pengaruh variabel Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA adalah 13,2%. Sisanya sebesar 86,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan. Temuan menonjol yang didapat dari penelitian adalah lemahnya sumber daya bagi implementasi program KUKESRA. Sumber daya dimaksud adalah pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan yang memadai. Kebijakan pengadaan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang digariskan oleh BKKBN ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana di lapangan. Di pihak lain resipien justru cenderung memanfaatkan dana KUKESRA untuk keperluan-keperluan konsumtif.

Akhirnya terdapat dua implikasi penting yang menjadi temuan penelitian ini. **Pertama**, menyangkut aspek teoritis. Semakin menguatkan teori tentang hubungan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan. Artinya teori-teori kebijakan dari George C. Edward III (1980), David C. Korten (1988), William N. Dunn (1992) dan

lain-lain yang menjadi pijakan penelitian terbukti. **Kedua**, adalah implikasi praktis yaitu sebagai umpan balik (*feed back*) kepada BKKBN Kabupaten Pemalang selaku organisasi pelaksana untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap implementasi program KUKESRA. Alternatif yang diajukan adalah dengan memprioritaskan program KUKESRA Mandiri (yaitu KUKESRA yang diperuntukkan bagi kelompok yang memiliki jenis usaha yang sudah berkembang) tanpa meninggalkan penanganan terhadap tunggakan KUKESRA dengan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang memadai.

ABSTRACT

*The Implementation of KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) in Taman sub district of Pemalang regency has not been effective yet. It was indicated from many delinquents of KUKESRA. The debt was unpaid. Until June 2002 the unpaid debt was 1,45 million rupiahs. Ironically 65,7% of the unpaid debt was on the leader or cadre of KUKESRA groups. They were from wealthy families. Whereas normatively KUKESRA was allocated for the poor families in order to increase their welfare. It means that the policy of KUKESRA is not effective. It is assumed that there was a correlation between attitude, resources and monitoring toward the implementation of KUKESRA. This research will analyze the correlation of variables that may influence. This research used quantitative approach. Sample was taken from the recipients of KUKESRA in Taman sub district. It was taken randomly based on geographical cluster with multi stage level. The number of the sample is 64. After the test of validity and reliability the questionnaire as the main data instrument were spread. Then the data were processed through statistical analysis (regression analysis). Here the computer software (SPSS 10 for Windows) was used. The printouts of the computer give some statistical numbers. The correlation coefficient (r) is 0,363. According to the guide for interpreting of correlation coefficient Sugiyono (2002: 216), it means that the correlation was low. This coefficient was significant for the level of confidence 0,05. The determination coefficient (r^2) is 0,132. It means that the influence of attitude, resources dan monitoring variables together towards the implementation of KUKESRA is 13,2%. Finally, this research has two main implications. **First**, theoretic implication that the policy theories from George C. Edward III (1980), David C. Korten (1988), William N. Dunn (1992) and many other theorists was proved. It means that there was a correlation between attitude, resources and monitoring toward the implementation of a policy. **Second**, practical implication that BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) as the executor of KUKESRA should improve its policy performance. It needs to pay more attention of human resources development in implementing KUKESRA as a public policy.*

MOTTO:

Maha Suci Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah mengeluarkan aku dari kegelapan hati menuju terang benderang ilmu dengan ridho dan kasih sayang-Nya.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini aku persembahkan sebagai wujud bakti kepada Ibu dan Bapak. Semoga esok hari aku mampu mengurangi beban yang selama ini aku timpakan kepada keduanya. Ibu..Bapak sungkem bakti Ananda.

DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan.....	iv
Abstract	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1. Kebijakan Publik	15
2.1.2. Implementasi Kebijakan.....	17
2.1.3. Determinan Implementasi Kebijakan.....	18
2.1.4. Sikap	25
2.1.4.1 Definisi Sikap	
2.1.4.2 Pembentukan Sikap	29
2.1.4.3 Perubahan Sikap	30
2.1.5 Sumber Daya	32
2.1.6 Pengawasan.....	37
2.1.7 Hubungan Sikap dengan Implementasi	44

2.1.8 Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi.....	45
2.1.9 Hubungan Pengawasan dengan Implementasi	47
2.1.10 Hubungan Sikap, Sumber Daya Dan Pengawasan dengan Implementasi	48
2.1.11 Model Kerangka Berpikir.....	49
2.2 Hipotesis Penelitian	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian/ Perspektif Pendekatan	54
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian.....	54
3.3 Lokasi Penelitian	55
3.4 Variabel Penelitian	58
3.5 Definisi Konseptual	59
3.6 Definisi Operasional.....	59
3.7 Jenis dan Sumber Data	68
3.8 Instrumen Penelitian.....	69
3.9 Populasi dan Teknik Pengambilan sampel	69
3.10 Teknik Pengumpulan Data	72
3.11 Teknik Analisis Data	73
3.12 Jadwal (Proposal)	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
4.2 Hasil Penelitian	88
4.2.1 Implementasi Program KUKESRA.....	89
4.2.2 Sikap.....	93
4.2.3 Sumber daya.....	99
4.2.4 Pengawasan	108
4.3 Analisis Hasil Penelitian	117
4.3.1 Pengujian Hipotesis Minor 1.....	118
4.3.2 Pengujian Hipotesis Minor 2.....	120

4.3.3 Pengujian Hipotesis Minor 3.....	121
4.3.4 Pengujian Hipotesis Mayor	122
4.4 Diskusi.....	123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Tunggakan KUKESRA di Kabupaten Pemalang pada bulan Maret 2002.....	7
1.2 Perincian Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman pada bulan Maret 2002	8
3.1 Posisi Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman pada bulan Maret 2002	57
3.2 Matriks Variabel-variabel Penelitian.....	65
3.3 Populasi Penelitian.....	72
3.4 Proses Penarikan Sampel	73
4.1 Penduduk Kecamatan Taman menurut Mata Pencaharian	79
4.2 Usaha Ekonomi Produktif.....	86
4.3 Tingkat Pendidikan Responden	87
4.4 Tingkat Penghasilan Responden	88
4.5 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden.....	88
4.6 Peningkatan Jumlah Peserta KUKESRA.....	89
4.7 Perkembangan Usaha Ekonomi Produktif.....	90
4.8 Jumlah Penunggak Merah.....	91
4.9 Peningkatan Tahapan Keluarga Sejahtera	92
4.10 Perkembangan TAKESRA.....	92
4.11 Tingkat kebutuhan akan KUKESRA	93
4.12 Pengetahuan Responden tentang Tujuan KUKESRA.....	94
4.13 Pengetahuan Responden tentang Aturan KUKESRA.....	95
4.14 Kepercayaan responden terhadap Program KUKESRA dalam Peningkatan Kesejahteraan	96
4.15 Kepercayaan responden terhadap keberhasilan Tujuan Program KUKESRA.....	97
4.16 Perasaan responden terhadap Program KUKESRA.....	98

4.17 Kesiediaan responden untuk hadir dalam penyuluhan KUKESRA	98
4.18 Mengikuti Pelatihan KUKESRA	99
4.19 Penilaian responden tentang Materi Kewirausahaan	101
4.20 Penilaian responden terhadap Kemampuan Petugas	102
4.21 Kelengkapan Informasi kewirausahaan	103
4.22 Sifat tepat waktu Informasi Kewirausahaan	104
4.23 Konsistensi Informasi Kewirausahaan	105
4.24 Kewenangan PLKB untuk menentukan Jenis Latihan Kewirausahaan	106
4.25 PLKB Mengawasi Kewirausahaan	107
4.26 Pemeriksaan oleh PLKB kepada Kelompok KUKESRA	108
4.27 Pemeriksaan oleh Ketua Kelompok kepada Anggota	109
4.28 Membuat Laporan Kepada Petugas PLKB	111
4.29 Bentuk Laporan Kepada Petugas PLKB	112
4.30 Responden menerima pengarahan-pengarahan KUKESRA	113
4.31 Melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi	114
4.32 Tindakan perbaikan atas penyimpangan	115
4.33 Dampak Perbaikan	117
4.34 Ringkasan Pengujian Hipotesis Minor 1	119
4.35 Ringkasan Pengujian Hipotesis Minor 2	120
4.36 Ringkasan Pengujian Hipotesis Minor 3	121
4.37 Ringkasan Pengujian Hipotesis Mayor	122
4.38 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1.1 Grafik penyerapan KUKESRA di Kabupaten Pemalang sampai bulan Maret 2002.....	10
1.2 Realisasi Penyaluran KUKESRA di Kabupaten Pemalang sampai bulan Maret 2002.....	10
2.1 Teori Pelembagaan Program menurut David C. Korten	18
2.2 Model Implementasi menurut E.S Quade.....	20
2.3 Model Implementasi menurut M.S Grindle	21
2.4 Model Implementasi menurut Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian	23
2.5 Model Implementasi menurut George C. Edward III	24
2.6 Proses Pengawasan menurut Harold Koontz dan Cyrill O'Donnel...	39
2.7 Bangun Teori.....	50
2.8 Model Kerangka Berpikir.....	51
2.9 Hipotesis Penelitian.....	53
4.1 Realisasi Penyerapan KUKESRA di Kecamatan Taman, sampai bulan Juni 2002.....	81
4.2 Posisi Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman, bulan Maret 2002.....	84
4.3 Perkembangan Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman, bulan Maret 2002 sampai dengan Juni 2002	85
4.4 Persebaran Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman, bulan Juni 2002.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) untuk Responden (resipien) KUKESRA
2. Panduan Wawancara (*Interview Guide*) untuk Kepala BKKBN Kantor Kabupaten Pemalang
3. Daftar Istilah dalam Program KUKESRA
4. Foto-foto kegiatan penelitian
5. *Print Out* SPSS 10. (Perhitungan Statistik untuk pengujian Hipotesis)
6. Surat Ijin Penelitian dari Ketua Program Studi MAP UNDIP Semarang
7. Surat Ijin Penelitian dari Kepala BKKBN Kabupaten Pemalang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal sebelum terjadinya krisis tersebut jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang.

Menurut standar 1996, pada tahun 1996 garis kemiskinan di daerah perkotaan adalah 38.246 rupiah dan di daerah pedesaan 27.413 rupiah perbulan perkapita (BPS, 2001: 563). Dibanding dengan perhitungan 1993 yang lalu, garis kemiskinan 1996 lebih tinggi yaitu 37 persen untuk perkotaan, dan 50 persen untuk pedesaan. Dengan demikian garis kemiskinan di daerah pedesaan meningkat lebih cepat dibanding dengan daerah perkotaan.

Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik (BPS, 2001: 564) pada Februari tahun 1999 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 48,4 juta orang, dimana sekitar 67,6 persen tinggal di daerah pedesaan. Dibandingkan dengan tahun 1998 jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan sebesar 2,2 persen. Penurunan penduduk miskin hanya terjadi di daerah perkotaan yaitu dari 17,6 juta pada tahun 1998 menjadi 15,7 juta pada tahun 1999 atau mengalami

penurunan sebesar 10,8 persen. Sebaliknya di daerah pedesaan mengalami peningkatan sebesar 2,5 persen.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah melalui program pembangunan Keluarga Sejahtera berkeinginan untuk membangkitkan minat/gairah berwirausaha kepada keluarga yang termasuk dalam katagori Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Agar minat/gairah berwirausaha tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tentunya diperlukan dana yang memadai.

Diantara berbagai dukungan yang diberikan, salah satunya adalah fasilitas Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA). KUKESRA adalah kredit lunak yang diberikan kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) yang telah memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA) dan tergabung dalam kelompok usaha/UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Bantuan KUKESRA diberikan kepada keluarga tersebut di atas secara bertahap dengan maksimum kredit Rp.20.000,- pada putaran pertama, Rp.40.000,- pada putaran kedua, Rp.80.000,- pada putaran ketiga, Rp.160.000,- pada putaran keempat dan Rp.320.000,- pada putaran kelima. Selanjutnya setiap pinjaman KUKESRA akan dipotong langsung sebesar 10% untuk dimasukkan ke dalam rekening TAKESRA kelompok/anggota yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi antar lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Program ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10, tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dilengkapi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21, tahun 1996 tentang Penyediaan dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9, tahun 1996 tentang Pembentukan Dana bantuan Presiden bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.

Pemberian KUKESRA dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN bersama-sama dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, PT.Bank Negara Indonesia Tbk dan PT. Pos Indonesia dengan cara dan prosedur yang mudah serta bunga yang rendah untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif keluarga yang ditumbuhkembangkan oleh Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

Tujuan KUKESRA secara umum adalah membantu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) untuk meningkatkan tahapan Keluarga Sejahtera melalui kegiatan ekonomi produktif dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan secara khusus tujuan KUKESRA adalah :

- a. Membantu keluarga untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat ringan, mudah dan cepat.
- b. Merangsang kesadaran, motivasi dan semangat keluarga untuk berwirausaha.
- c. Membantu keluarga mengembangkan kegiatan kemitraan usaha dalam bidang ekonomi.
- d. Meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan dan pelayanan pos oleh keluarga.(BKKBN,1997:7).

Dengan demikian sasaran program KUKESRA adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) yang ikut tergabung dalam wadah kelompok usaha/UPPKS.

Permohonan pengajuan pinjaman KUKESRA dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok usaha/ UPPKS yang menginginkan bantuan pinjaman KUKESRA terlebih dahulu mendaftarkan para anggotanya (keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I karena alasan ekonomi) yang memerlukan pinjaman KUKESRA ke dalam formulir permohonan KUKESRA yang telah tersedia.

Dalam melakukan pelayanan KUKESRA kepada para keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi), terdapat tujuh komponen yang terlibat dengan peran masing-masing (BKKBN, 1997: 20-25), yaitu:

- a. Kelompok Usaha/UPPKS
- b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)
- c. Kepala Desa/ Lurah
- d. Petugas Pengawas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB)
- e. Kantor Pos Pelaksana
- f. Kantor Pos Pemeriksa (KPRK)
- g. Kantor Bank BNI padanan yang ditunjuk .

Data hasil pendataan keluarga menunjukkan masih tingginya angka keluarga miskin (Pra Sejahtera dan Sejahtera I) alasan ekonomi yang sangat rentan tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Laporan di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kantor kabupaten Pemalang pada bulan Maret 2002 menunjukkan jumlah anggota KUKESRA yang ada di kabupaten Pemalang sebanyak 122.906. Dari jumlah tersebut, mereka yang tergolong keluarga Pra Sejahtera sebanyak 90.244 dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 32.662 .

Dari hasil pelaporan rutin menunjukkan bahwa kegiatan program pemberdayaan keluarga seperti UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dengan TAKESRA (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) ternyata sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya perencanaan keluarga dan perlunya sikap hidup mandiri. Namun demikian kualitas pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Terbukti dengan masih banyaknya tunggakan KUKESRA yang ada di masyarakat.

Sampai dengan bulan Maret 2002 jumlah anggota kelompok UPPKS yang ada sebanyak 4.712 kelompok. Kucuran dana yang diterima adalah sebesar Rp.23.891.499.136,-. Data perkembangan TAKESRA (tabungan keluarga sejahtera) dan KUKESRA (kredit usaha keluarga sejahtera) sampai dengan bulan Maret 2002 di kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan TAKESRA di daerah non IDT: Penyerapan dana TAKESRA sampai akhir Maret 2002 mencapai Rp. 3.313.398.774,-.
- b. Perkembangan TAKESRA di daerah IDT: penyerapan dana baru mencapai Rp.825.457.245,-.
- c. Perkembangan KUKESRA di daerah non IDT: sampai dengan bulan Maret 2002 penyerapannya sudah mencapai Rp. 23.100.652.535,- dari dropping sebesar Rp. 23.891.499.136,-.
- d. Perkembangan KUKESRA di daerah IDT: sampai dengan bulan Maret 2002 penyerapannya sebesar Rp. 545.230.450,-.
- e. Tunggakan KUKESRA: Di daerah non IDT total tunggakan KUKESRA sampai dengan Maret 2002 adalah Rp.6.613.551.579,- dari total penyerapan. Untuk daerah IDT terdapat total tunggakan KUKESRA sebesar Rp. 160.245.250,-

Selengkapnya data mengenai realisasi penyerapan dan tunggakan KUKESRA di kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam Tabel 1.1, Gambar 1.1 dan gambar 1.2.

Tabel 1.1

**TUNGGAKAN KUKESRA
KAB. PEMALANG
BULAN MARET 2002**

No	Kecamatan	Tunggakan										Saldo List Kukesra (IDT dan Non IDT)	Prosentase	Ranking
		IDT			Non IDT				Jumlah (IDT dan Non IDT)	Jumlah List	Ranking			
		Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Moga	-	-	-	625.104.105	16.216.454	668.320.559	668.320.559	682.188.559	97,97	2			
2	Pulosari	35.850.000	586.125	36.436.125	437.605.728	12.276.187	449.881.915	486.318.040	728.578.046	66,93	9			
3	Belik	9.025.199	120.799	9.145.998	667.079.138	17.203.793	684.282.931	693.428.929	813.836.367	85,20	7			
4	Watukumpul	21.175.001	329.687	21.504.688	212.872.687	5.456.420	218.329.107	239.833.795	434.705.964	55,17	10			
5	Bodeh	-	-	-	215.620.372	6.330.874	222.251.246	222.251.246	479.042.640	46,39	13			
6	Bantarbolang	-	-	-	294.665.634	8.025.790	302.681.242	302.681.242	312.489.424	96,86	3			
7	Randudongkal	-	-	-	478.122.086	12.742.076	490.864.162	490.864.162	573.082.270	85,65	6			
8	Penalang	21.896.496	466.307	22.362.802	552.793.549	16.913.267	569.706.816	592.069.618	781.203.306	75,79	8			
9	Taman	-	-	-	1.215.885.452	34.228.100	1.250.113.552	1.250.113.552	1.250.113.552	100,00	1			
10	Petarukan	2.700.000	33.750	2.733.750	391.152.318	10.677.520	401.829.838	404.563.588	807.637.290	50,09	11			
11	Anjel Gading	-	-	-	123.628.867	2.937.365	126.566.232	126.566.232	271.227.661	46,66	12			
12	Comal	1.333.332	23.323	1.356.664	518.491.096	8.606.242	527.097.338	527.097.338	665.636.471	89,83	4			
13	Uluji	-	-	-	765.604.717	22.481.715	808.086.432	808.086.432	924.699.626	87,39	5			
14	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah		91.980.027	1.560.000	93.540.027	6.345.915.749	174.095.803	6.520.011.552	6.613.551.579	8.424.441.176	Rata-rata		78,52		

Keterangan :

1. Sumber Data Kantor Pos Pemalang
2. Ranking dibuat berdasar tunggakan Kukesra dengan saldo list Kukesra
3. Kec. Warungpring masih mengindik pada Kec. Moga

Dari 14 kecamatan penerima program KUKESRA, kemacetan (tunggakan) terbesar terjadi di wilayah kecamatan Taman yaitu sebesar 1,2 miliar rupiah (100 persen). Diikuti kecamatan Moga sebesar Rp. 682.188.559,- atau 97,97 persen dan kecamatan Bantar Bolang sebesar Rp. 312.489.242,- atau 96,86 persen.

Lokasi penelitian selanjutnya difokuskan pada kecamatan Taman dengan alasan bahwa penyerapan dana KUKESRA di kecamatan ini sangat sangat tinggi yaitu 3,54 miliar rupiah (Maret, 2002). Namun demikian kemacetan (tunggakan) yang terjadi juga cukup besar yaitu lebih dari 1,2 miliar rupiah. Secara rinci tunggakan KUKESRA di kecamatan Taman sampai akhir bulan Maret 2002 dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perincian Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman (Maret 2002)

No	DESA	POSISI TUNGGAKAN			JUMLAH
		Kader (Rp)	Anggota (Rp)		
			Usaha Pailit	Gagal Panen	
1.	Sokawangi	54.237.464	7.799.753	3.138.253	65.175.470
2.	Gondang	59.657.819	8.408.112	9.290.452	77.356.383
3.	Jrakah	55.691.927	10.889.973	24.660.000	91.241.900
4.	Banjaran	41.033.374	3.947.950	4.825.273	49.806.597
5.	Jebed	169.430.295	15.731.283	29.292.000	214.753.578
6.	Cibelok	50.191.877	16.337.034	8.543.633	75.072.544
7.	Kaligelang	125.452.193	17.832.867	27.642.658	170.927.718
8.	Taman	76.429.880	7.848.183	18.321.995	102.600.058
9.	Banjardawa	19.912.281	6.539.645	--	26.451.926
10.	Pedurungan	85.366.214	16.974.075	6.601.032	108.941.321
11.	Beji	102.799.370	15.386.626	6.912.772	125.098.786
12.	Wanarejan	44.432.841	9.505.805	1.221.000	55.159.696
13.	Kedungbanjar	22.318.756	10.718.560	10.350.324	43.387.640
	JUMLAH	906.954.338	147.919.870	151.099.391	1.205.973.599

Sumber: BKKBN Kantor Kabupaten Pemalang, Maret 2002

Dari tabel terlihat bahwa posisi tunggakan ada pada kader dan anggota kelompok. Pada kader terjadi kemacetan sebesar Rp. 906.954.338,-. Sedangkan pada anggota, kemacetannya sebesar Rp. 299.019.261,-. Kemacetan pada anggota disebabkan karena usaha pailit dan gagal panen masing-masing sebesar Rp.147.919.870,- dan Rp.151.099.391,-.

Fenomena terjadinya gagal panen dan usaha pailit yang menyebabkan kerugian (tunggakan KUKESRA) sebesar Rp. 299.019.261,- menunjukkan bahwa implementasi program KUKESRA (peningkatan kesejahteraan melalui usaha ekonomi produktif) belum tercapai. Disamping itu juga terjadi penyimpangan keuangan oleh kader KUKESRA sebesar Rp. 906.954.338,- yang menunjukkan bahwa program itu mengalami salah sasaran.

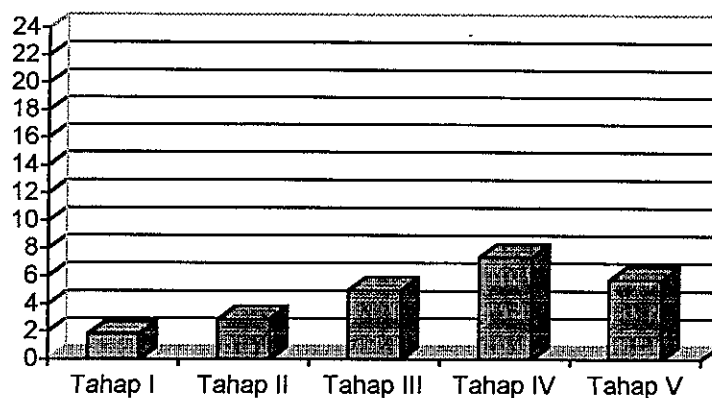
Padahal di luar desa-desa (non IDT) penerima program KUKESRA itu masih ada enam desa lain (IDT) di wilayah kecamatan Taman yang tidak mengikuti program KUKESRA. Ketidakikutsertaan desa-desa IDT itu dalam program KUKESRA merupakan kebijakan dari aparat kecamatan setempat untuk menghindari terjadinya tunggakan KUKESRA yang lebih besar lagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program KUKESRA itu belum efektif.

Gambar 1.1. Grafik Penyerapan KUKESRA sampai bulan Maret

2002

GRAFIK PENYERAPAN DANA KUKESRA DI KAB. PEMALANG
Sampai dengan bulan Maret 2002

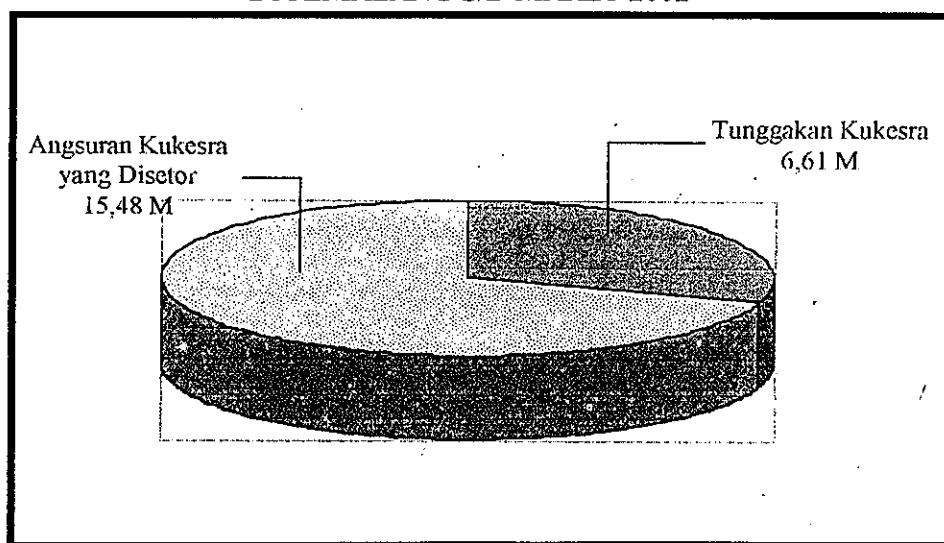
(milyar Rp.)



Sumber : BKKBN Pemalang, April 2002

Gambar 1.2

REALISASI PENYALURAN KUKESRA
DI PEMALANG S/D MARET 2002



Sumber : BKKBN Pemalang, April 2002

Adanya tunggakan KUKESRA yang cukup besar itu menunjukkan bahwa implementasi program tersebut tidak efektif. Mengapa terjadi tunggakan? Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi program KUKESRA itu tidak efektif? Inilah pertanyaan-pertanyaan penting yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini. Sebab apabila kita tahu permasalahan yang sebenarnya maka kita dapat membuat kebijakan-kebijakan baru atau setidaknya memperbaiki program yang sudah ada dengan merubah faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya agar program KUKESRA ini dapat berjalan dengan efektif.

Namun pada kenyataannya keberhasilan implementasi sebuah program ditentukan oleh banyak faktor. Menurut George C. Edward III (1980) berbagai determinan dalam implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sikap, sumber daya dan struktur birokrasi. Mengingat beragam dan kompleksnya kegiatan yang saling terkait dan berintegrasi di dalam implementasi, maka fungsi pengawasan sangat diperlukan.

Pengawasan dimaksud disini adalah pemantauan (*monitoring*), yaitu pemantauan selama program atau kebijakan sedang berlangsung. Pemantauan (*monitoring*) menurut Dunn (1992: 28) membantu pengambil kebijakan untuk menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari sebuah kebijakan atau program, dan mengidentifikasi hambatan serta rintangan dalam proses implementasi

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu pada temuan selama pra survei dapat diketahui bahwa penyebab ketidakberhasilan program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya antara lain adalah karena tiga faktor. Pertama, adalah **sikap yang tidak mendukung** terhadap program tersebut. Sikap yang tidak mendukung ini ditunjukkan dengan tingginya tunggakan KUKESRA, baik pada kader maupun anggota. Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa posisi tunggakan KUKESRA terbesar justru ada pada kader, yaitu Rp. 906.019.261,-. Sedangkan tunggakan pada anggota tercatat sebesar Rp. 299.019.261,-. Sehingga total tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman mencapai Rp. 1.205.973.599,-.

Kedua, adalah **sumber daya yang kurang memadai** bagi kelancaran program KUKESRA. Hal ini terlihat dari *out come* pelatihan kewirausahaan yang belum mampu membangkitkan minat/ gairah berwirausaha di kalangan resipien (penerima program) KUKESRA. Resipien justru cenderung untuk memanfaatkan dana KUKESRA bagi keperluan-keperluan konsumtif.

Ketiga, adalah **pengawasan yang tidak optimal** terhadap pengelolaan dana KUKESRA. Padahal dengan banyaknya instansi yang terlibat (BKKBN, PT. Pos Indonesia, PT. Bank BNI Tbk, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri) mestinya mekanisme pengawasan berjalan lebih efektif. Namun dalam kenyataannya, justru sebaliknya. Terjadi beberapa penyimpangan, sementara tindakan korektif (represif) terhadap para pelanggar KUKESRA belum berjalan optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa program KUKESRA sebetulnya sangat efektif untuk pemberdayaan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlunya sikap hidup mandiri. Namun di sisi lain, terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi program merupakan suatu kendala tersendiri yang perlu dicarikan jalan pemecahannya. Fenomena-fenomena ini menjadi pendorong bagi peneliti untuk mengamati lebih lanjut hubungan antara sikap, sumber daya dan pengawasan dengan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Sesuai identifikasi tersebut, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Apakah ketidakberhasilan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang memiliki hubungan dengan sikap terhadap program tersebut?
2. Apakah ketidakberhasilan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang memiliki hubungan dengan sumber daya yang tersedia bagi program tersebut?
3. Apakah ketidakberhasilan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang memiliki hubungan dengan pengawasan terhadap program tersebut?
4. Apakah ketidakberhasilan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang memiliki hubungan dengan sikap, sumber daya dan pengawasan terhadap program tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Menganalisis hubungan antara sikap pelaksana dan penerima program dengan tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Menganalisis hubungan antara sumber daya dengan tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
3. Menganalisis hubungan antara tingkat pengawasan dengan tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
4. Menganalisis hubungan antara sikap, sumber daya dan tingkat pengawasan dengan tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi program yang efektif untuk dilaksanakan.
2. Memberi masukan kepada BKKBN Kantor Kabupaten Pemalang tentang efektifitas implementasi program KUKESRA yang telah

dilaksanakan, beserta alternatif yang diberikan guna perbaikan pengelolaan program.

3. Memberikan alternatif kepada peneliti lain yang masih berminat untuk mengkaji permasalahan program KUKESRA di Kabupaten Pemalang, khususnya yang menyangkut penelitian pengembangan (*developmental research*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori/ Pengkajian Teoritis

2.1.1. Kebijakan Publik

Banyak konsep kebijakan publik yang pernah dibahas oleh para ahli, salah satu diantaranya telah dikemukakan oleh Solichin Abdul wahab (1990: 30-31) yang mengatakan terdapat dua pandangan dalam definisi kebijakan publik, yaitu :

1. Pertama, pendapat para ahli yang mengidentikkan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat disebut kebijakan publik.
2. Kedua, pendapat para ahli yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan. Para ahli yang berpendapat demikian dapat dibagi dalam dua kutub, yaitu mereka yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa publik mempunyai akibat atau dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya.

Sementara ada para ahli yang menitikberatkan kebijakan sebagai suatu rangkaian keputusan atau tindakan. Tokoh yang mempunyai pandangan pertama adalah Parker dan Thomas Dye. Parker (dalam

Dwiyanto, 1994:7) telah mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan Thomas Dye (dalam Dwiyanto, 1994: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam pandangan Mustopadidjaja (2000: 3) kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Kompleksitas dan dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan kita tujukan pada proses kebijakan. Dari sudut manajemen, proses kebijakan dapat dipandang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok utama, yaitu (1) *pembuat kebijakan*, (2) *[pengendalian] pelaksanaan kebijakan*, dan (3) *akuntabilitas kinerja kebijakan*. Semua berlangsung dalam suatu lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur-unsur yang kompleks, subjek dan objek yang berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi, dan dengan kepentingan serta motif-motif yang majemuk.

Kebijakan publik menurut Mustopadidjaja (2000:4) merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Adapun program pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari kebijakan. Sebagaimana disebutkan dalam modul sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dalam masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Konsep 'implementasi' menurut kamus Webster (dalam Wahab, 1997: 64) berasal dari kata *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Ini berarti bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1997: 65) yang mengatakan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

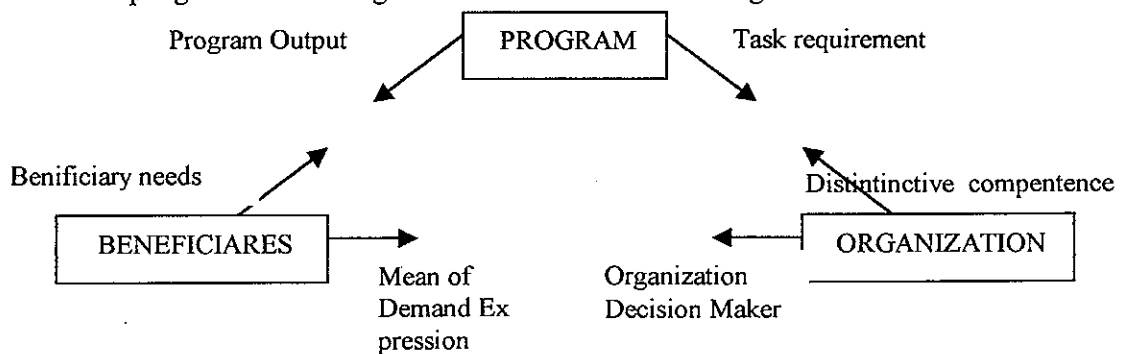
Senada dengan para pakar sebelumnya William N. Dunn (1992 : 80) mengatakan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.

Dalam pengertian ini berarti ada suatu proses dinamis dalam implementasi kebijakan, yaitu dalam hal pencapaian tujuan. Pelaksanaan kebijakan itu sendiri menjadi sesuatu sangat penting, bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan itu sendiri, seperti dikatakan oleh Udoji (dalam Wahab, 1997: 59): *"The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented."*

2.1.3. Determinan Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi suatu kebijakan banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. David C. Korten dengan teori pelebagaan program (1988:132) mengatakan bahwa keberhasilan suatu program terjadi bila terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, dan proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran.

Keterkaitan antara elemen-elemen dalam pelebagaan program itu bila digambarkan akan terlihat sebagai berikut:



Gambar.2.1 Teori pelebagaan program menurut David C. Korten

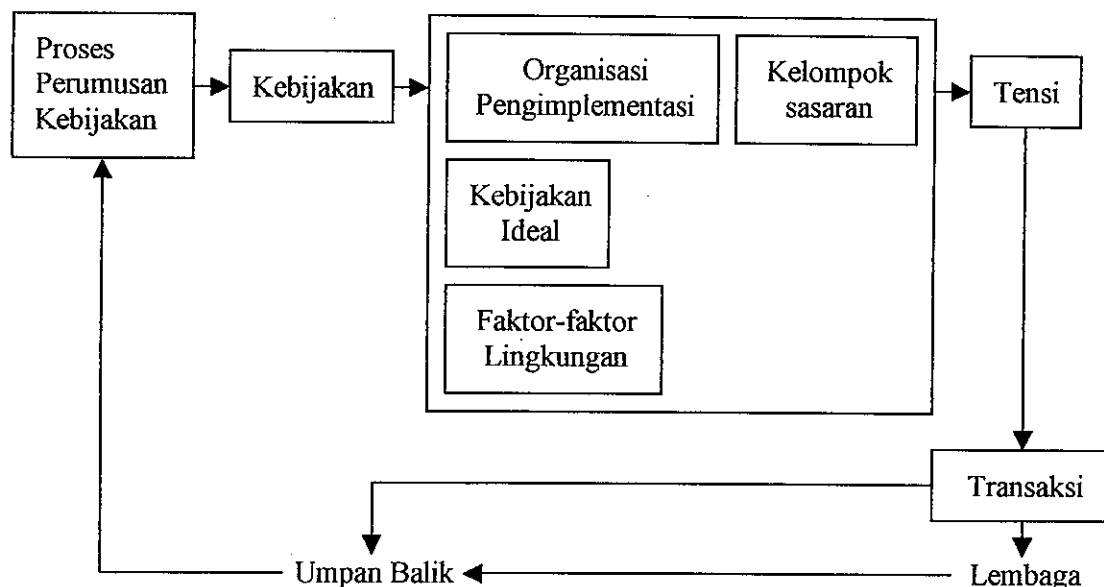
Menurut E.S. Quade (1984: 310) dalam proses implementasi kebijakan akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya suasana yang agak memanas (*tensions*) dan kemudian diikuti tindakan tawar menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Quade (1984: 310) juga memberi gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. *The idealized policy, that is the idealized pattern of interaction that those who have defined that policy attempting to induce.*
2. *The target group, defined as those who are required to adopt new pattern of interaction by the policy and who must change to meet its demands.*
3. *The implementing organization, usually a unit of the government bureaucracy responsible for implementation of the policy; and*
4. *Environmental factors, those element in the environment that influenced by the policy implementation.*

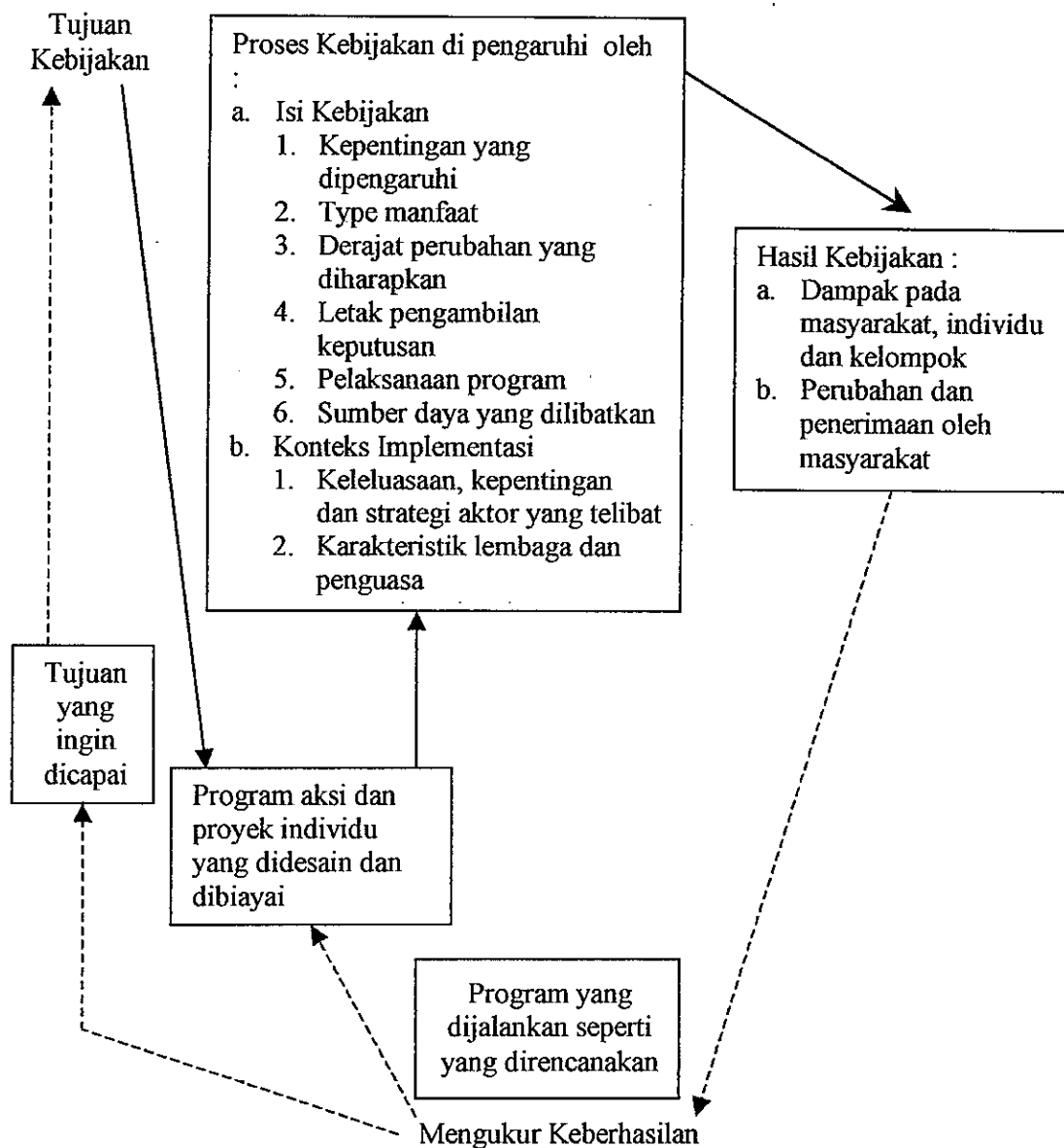
Sehingga proses implementasi menurut E.S. Quade dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Model Implementasi Menurut E.S Quade



Sedangkan menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994: 22) implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan, atau dalam studi implementasi akan melihat adanya dimensi atas suatu organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi tersebut dengan lingkungan. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Sehingga apabila model Grindle itu digambarkan akan nampak sebagai berikut :

Gambar 2.3 Model Implementasi M.S. Grindle



Menurut Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab, 1997 : 81) bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan

dari seluruh proses implementasi. Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain:

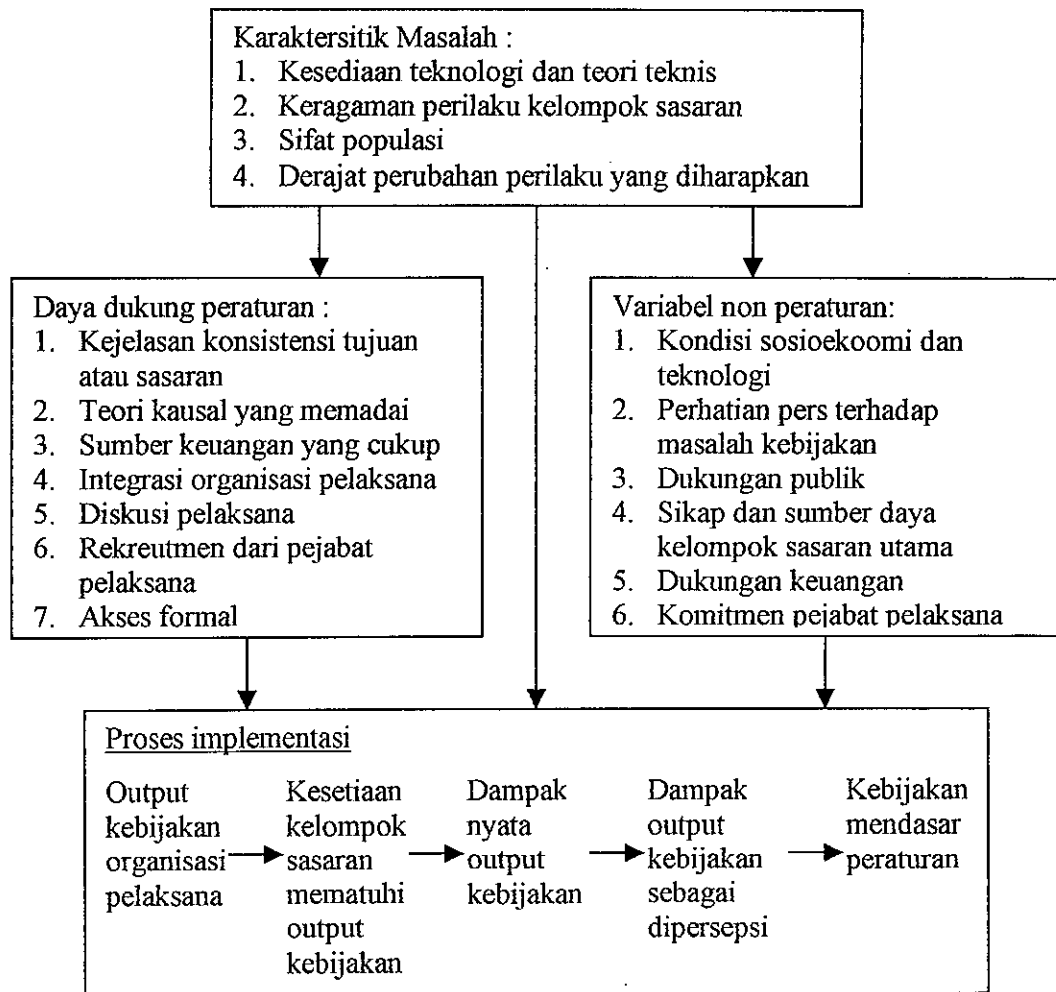
1. Kemudahan implementasi akan ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Struktur manajemen program yang mengoperasionalkan kebijakan, menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Faktor-faktor di luar peraturan, yaitu pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Dengan demikian implementasi akan lebih efektif bila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya.

Model implementasi kebijakan dari Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4 Model Implementasi

Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian



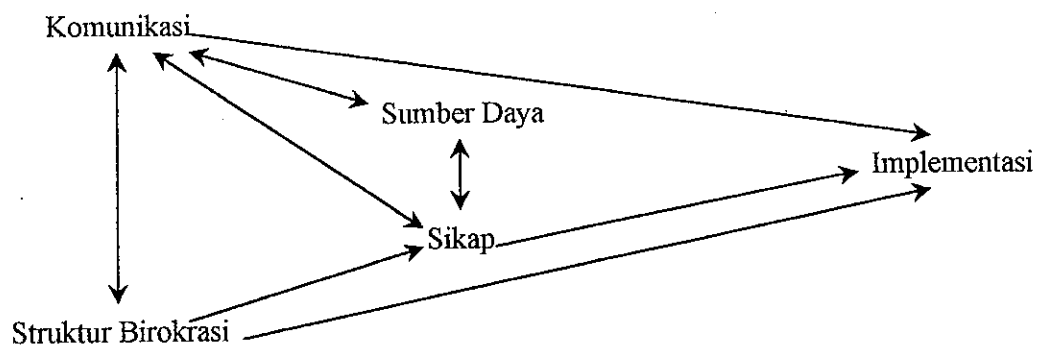
Senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya, menurut George C. Edward III (dalam Purnaweni, 1991:3) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan antara lain :

1. Komunikasi; merupakan proses menyalurkan informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.

2. Sumber-sumber daya (*resources*); dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
3. Sikap-sikap (*disposisi*); sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.
4. Struktur birokrasi; dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*standart operating procedures*) atau prosedur standar pelaksanaan dan fragmentasi. SOPs dapat mempengaruhi implementasi yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Secara skematis, interaksi dari keempat faktor yang mempengaruhi gagal dan berhasilnya suatu implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Model Implementasi Menurut George C. Edwards III



Dari berbagai teori yang telah disampaikan para ahli di atas, maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) sebagai landasan penelitian. Teori ini berasumsi bahwa

implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (disposisi), sumber daya dan struktur birokrasi.

Dalam hal ini penulis hanya akan mengadopsi dua variabel bebas dari teori implementasi Edward yang relevan dengan kondisi permasalahan di lapangan, yaitu sikap dan sumber daya. Selanjutnya dalam pemecahan indikator (*breakdown indicator*) tentang implementasi nantinya akan diadakan modifikasi antara teori dari George C. Edward III dan para pakar lainnya dengan indikator implementasi dari BKKBN selaku organisasi pelaksana program. Dengan demikian hasil analisisnya diharapkan lebih memadai.

2.1.4 Sikap

2.1.4.1 Definisi Sikap

Dalam studi kepustakaan mengenai sikap sebagaimana dikatakan oleh Mar'at (1984: 9) sikap merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya. Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor kultural. Sehingga perubahan dari sikap ini sering bersifat situasional.

Sebagai hasil belajar, sikap menurut Mar'at (1984:17) dapat diubah, diacuhkan, atau dikembalikan seperti semula walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan demikian jelas bahwa sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi berupa pre-disposisi dari tingkah laku. Hal

ini senada dengan yang dikatakan oleh Zimbardo dan Ebbesen (dalam Suardiman, 1990: 13) yang menjelaskan makna sikap sebagai suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruhi) terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif dan behaviour.

Berbeda dengan dua pendapat itu Eagly dan Himmer Falb (dalam Djamaluddin, 1992: 23) mendefinisikan sikap sebagai kumpulan perasaan, keyakinan, kecenderungan perilaku yang secara relatif berlangsung lama dan ditujukan kepada orang, ide, objek atau kelompok tertentu. Dalam pengertian ini ditekankan adanya potensi perilaku yang dimiliki oleh individu terhadap objek di luar dirinya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap terdiri dari tiga komponen pokok yaitu, keyakinan (aspek kognitif), perasaan (aspek afektif), dan kecenderungan perilaku (aspek konatif).

Beberapa macam teori yang dikemukakan para ahli di atas, dapat dimasukkan dalam kerangka pemikiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Mar'at (1984: 23) yaitu pertama, adalah kerangka pemikiran yang diawali oleh Louis Thurstone (beliau perintis di bidang pengukuran sikap) dan Charles Osgood, yang mengatakan bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sedangkan Berkowitz (dalam Azwar, 1988: 18) mengatakan bahwa sikap terhadap objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) ataupun perasaan tidak mendukung (tak favorable) objek tersebut. Formulasi menurut Thurstone sendiri mengatakan bahwa sikap adalah derajat efek positif atau negatif yang dikaitkan dengan objek psikologis.

Kelompok pemikiran kedua, Gordon Allport (dalam Azwar, 1988: 33) mengungkapkan konsepsi tentang sikap. Menurut Allport, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Agaknya tidak keliru bila kita menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai kecenderungan potensial untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Kelompok pemikiran ketiga, adalah kelompok yang lebih berorientasi pada teori kognitif, menurut teori kelompok ini suatu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap objek.

Dari ketiga kelompok pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan definisi tentang sikap yaitu sikap merupakan konstelasi dari komponen kognitif yaitu proses evaluasi, komponen afektif yang melibatkan perasaan dan emosional untuk mendukung atau tidak mendukung suatu objek, serta komponen konasi yang menentukan kesediaan atau kesiapan jawaban berupa tindakan perilaku terhadap objek.

Mann (dalam Azwar, 1988: 18) menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali komponen kognitif ini disamakan dengan opini (pandangan) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Komponen afektif merupakan perasaan yang dimiliki individu terhadap objek. Yaitu sikap dan perasaan yang dikaitkan dengan masalah emosional.

Apakah yang menentukan reaksi emosional kita terhadap suatu objek? Pada umumnya reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang kita percaya sebagai benar bagi objek termaksud.

Komponen perilaku atau komponen konatif dalam sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek yang dihadapi. Asumsi dasar adalah bahwa kepercayaan mempengaruhi perilaku. Maksudnya bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi tertentu terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkan dalam bentuk perilaku terhadap objek.

Konsistensi antara kepercayaan sebagai komponen kognitif, perasaan sebagai komponen afektif, dan perilaku sebagai komponen konatif seperti itulah yang menjadi landasan penyimpulan sikap melalui observasi perilaku yang dicerminkan oleh jawaban dalam skala sikap.

Pengertian kecenderungan berperilaku menunjukkan bahwa komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja akan tetapi meliputi pula bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang.

Suatu objek atau perangsang akan ditanggapi pertanyaan dan selanjutnya timbul tindakan, terlebih dahulu melalui ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu agar objek dapat diantisipasi, maka diperlukan sikap yang positif. Tanpa sikap positif, suatu objek dalam hal ini program KUKESRA tidak dapat dilaksanakan.

2.1.4.2 Pembentukan Sikap

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Dalam interaksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Di antara faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah:

- Pengalaman pribadi
- Pengaruh orang lain
- Pengaruh kebudayaan
- Media massa
- Lembaga pendidikan dan lembaga agama
- Pengaruh faktor emosional

2.1.4.3 Perubahan Sikap

Bagaimana sikap dapat berubah? Pada teori Kelman (dalam Azwar, 1988: 23) ditunjukkan bagaimana sikap dapat berubah melalui tiga proses yaitu kesediaan, identifikasi dan internalisasi.

Dalam implementasi kebijakan, prosedur atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan atau tujuan kebijakan agar dapat diterima, dipahami dan dilaksanakan, maka terlebih dahulu harus dikomunikasikan. Pembentukan konsep pemahaman terhadap kebijakan tersebut merupakan tahap pembentukan persepsi. Karena konsepsi seseorang sangat bersifat pribadi maka diperlukan suatu strategi yang tepat dalam penerapan suatu kebijakan publik. Hal ini mutlak diperlukan mengingat suatu kebijakan dihadapkan pada dua kemungkinan utama, yaitu mendapat dukungan atau penolakan.

Dalam implementasi program KUKESRA, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi dari para pelaksananya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan melahirkan sikap yang berbeda-beda, yaitu mendukung sepenuhnya, acuh tak acuh atau bahkan penolakan.

Dalam implementasi program KUKESRA para pelaksana pemerintah dituntut untuk bersikap konsisten terhadap aturan-aturan program yang berlaku, misalnya dalam hal pembagian dana harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan, mensosialisasikan program dengan sungguh-sungguh ketengah-tengah masyarakat, serta mendampingi pokmas (kelompok masyarakat) yang kesulitan mengelola kegiatan dan lain-lain. Dengan demikian akan terbentuk keyakinan masyarakat akan niat baik pemerintah

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedangkan di pihak masyarakat sasaran harus memahami dan menyadari bahwa program ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi ditumbuhkan kesadaran bahwa program ini sangat bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian sikap-sikap yang dapat merugikan implementasi sejauh mungkin dapat dihindari. Lebih jauh lagi akan terbentuk sikap-sikap yang positif bagi keberhasilan implementasi program KUKESRA.

Adapun sikap-sikap dalam implementasi program KUKESRA diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a). Proses kognisi masyarakat sasaran terhadap program KUKESRA, yang terdiri dari persepsi, pendapat dan kepercayaan masyarakat. Bagian kognitif berkaitan dengan proses berfikir dengan tekanan khusus pada rasionalitas dan logika adalah suatu proses dengan mana anggota masyarakat sasaran dalam pikirannya memahami tentang tujuan, maksud dan cara-cara program KUKESRA dilaksanakan.
- b). Komponen afeksi masyarakat sasaran setelah memahami program KUKESRA. Komponen afeksi yaitu komponen emosional yang menyatakan perasaan senang atau tidak senang terhadap program KUKESRA.
- c). Komponen perilaku masyarakat sasaran dalam menghadapi program KUKESRA. Komponen perilaku berhubungan dengan kecenderungan masyarakat untuk bertindak menghadapi program KUKESRA dengan cara tertentu.

2.1.5 Sumber Daya

Berdasarkan teori pokok yang telah disebutkan di muka bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor kritis atau variabel yang dapat menghambat dan memperlancar kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Jadi sumber daya dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini adalah program KUKESRA.

Menurut Josep W. Eaton (1986: 25) sumber daya adalah merupakan faktor penting dalam suatu organisasi karena sumber daya merupakan sumber energi bagi organisasi. Sumber daya merupakan masukan-masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa untuk menambah kemampuan organisasi itu sendiri. Dalam pengertian ini sumber daya merupakan modal, sarana suatu lembaga untuk menjalankan keorganisasiannya.

Mengingat adanya kelangkaan dalam hal sumber daya, maka perlu adanya suatu prioritas dalam alokasi-alokasi sumber daya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Eaton (1986: 136) merinci tujuan tersebut sebagai :

- a). Mencapai perubahan-perubahan dalam nilai dan struktur di dalam atau di luar dirinya melalui pengalokasian yang strategis dan taktis.
- b). Menerapkan, memelihara dan melindungi pola-pola hubungan dan tindakan normatif melalui kepemimpinan dan penggunaan doktrin dengan alokasi strategis dan taktis.
- c). Memperoleh dukungan dan arus sumber-sumber daya dari organisasi dan sektor-sektor dalam lingkungannya.

Sumber daya menurut Milton J. Esman (1982: 33) diklasifikasikan dalam enam kategori, yaitu wewenang, dana, peralatan, fasilitas dan informasi. Wewenang legal dan politik mutlak dimiliki untuk keabsahan beroperasinya organisasi. Demikian juga dengan dana-dana yang diperlukan untuk membiayai fasilitas dan peralatan serta operasi yang sedang berlangsung. Peralatan dan fasilitas diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya implementasi suatu program atau kebijakan yang akan atau sedang berjalan.

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menyangkut staff / pegawai, tingkat informasi, luasnya wewenang maupun banyaknya fasilitas yang dimiliki. Selanjutnya konsep sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1). Staf/ pegawai

Pada dasarnya suatu organisasi beranggotakan orang-orang. Dalam pencapaian tujuan mutlak diperlukan orang-orang atau pegawai yang merupakan sumber daya utama bagi implementasi program atau kebijakan. Dalam suatu program atau kebijakan seringkali telah ditentukan orang-orang yang akan terlibat, berkaitan dengan jumlah persyaratan keahlian yang harus dimiliki. Apabila jumlah pegawai yang diperlukan tidak terpenuhi maka implementasi program atau kebijakan itu akan terhambat. Aspek kedua dari pegawai adalah keterampilan atau keahlian. Jadi selain

jumlah pegawai yang cukup masih diperlukan persyaratan keterampilan yang harus dimiliki (Purnaweni, 1991: 21).

2). Informasi

Informasi merupakan sumber daya produktif bagi implementasi program atau kebijakan. Informasi dapat dijadikan masukan dan juga keluaran dalam implementasi program atau kebijakan. Agar staff dapat mengimplementasikan program atau kebijakan maka harus mengetahui beberapa aspek informasi untuk mengimplementasikan program atau kebijakan. Informasi datang dalam dua bentuk, yaitu :

- a). Informasi mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijakan.
Implementor perlu untuk mengetahui apa dan kapan mereka diberi pengarahan.
- b). Informasi yang esensial adalah data tentang pemenuhan atas hal-hal lain dengan aturan-aturan pemerintah. Implementor harus mengetahui apakah orang-orang lain yang termasuk dalam implementasi kebijakan memenuhi hukum atau aturan (Purnaweni, 1991: 23).

Agar aturan kebijakan suatu program dapat diimplementasikan oleh staff atau pelaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan program yang telah dirumuskan maka staff atau pelaksana harus mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu perlu diberikan pengarahan dan petunjuk teknis tentang implementasi program atau kebijakan. Aspek lain dari informasi adalah informasi tentang staff yang akan membantu implementasi program atau kebijakan (Purnaweni, 1991: 64). Atas dasar

informasi tersebut maka implementor akan dapat mengetahui siapa saja yang akan terlibat dalam proses implementasi. Selain itu untuk dapat mengimplementasikan kebijakan diperlukan informasi tentang kesediaan dan kerelaan serta komitmen organisasi dan individu terhadap ketentuan kebijakan tersebut. Dengan informasi-informasi tersebut diharapkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan didukung oleh semua staff yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

3). Wewenang

Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang dilegalisasi untuk melaksanakan tanggung jawab yang diemban. Wewenang dapat didefinisikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan yang menjadi petunjuk bagi tindakan pihak lain. Hal ini menurut Herbert Simon (1961: 132) berkaitan dengan dua individu, superior dan subordinat. Superior membuat dan menyampaikan keputusan dengan harapan keputusan tersebut diterima dan dilaksanakan subordinat. Diharapkan dengan adanya pendelegasian wewenang akan dapat memberikan peningkatan tanggung jawab, menambah kemampuan pengambilan keputusan dan peningkatan koordinasi di antara berbagai kegiatan-kegiatan. Tanpa adanya pendelegasian wewenang kepada pelaksana program maka program tidak akan terlaksana dengan baik.

Keterlibatan banyak pihak/instansi dalam implementasi program KUKESRA akan membawa permasalahan dalam koordinasi. Masing-masing instansi ini bisa jadi memiliki perbedaan dalam persepsi dan

pelaksanaan isi program, yang banyak ditentukan oleh struktur birokrasinya. Perbedaan ini akan berdampak pada pelaksanaan koordinasi.

Adapun pengertian koordinasi menurut Dan Sugandha (1988: 12-13) adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi yang berbeda fungsi secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama, guna memudahkan pencapaian tujuan dengan efisien. Berdasarkan pada pengertian itu maka koordinasi antar aparat, baik dalam satu instansi maupun antar instansi perlu dilakukan guna mencegah timbulnya konflik, pemborosan waktu dan tenaga.

Untuk itu menurut Sugandha (1988: 47-48) ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan berkaitan dengan permasalahan wewenang, yaitu:

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai.
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, terutama target dan jadwalnya.
3. Adanya ketaatan dan loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang ditetapkan.
4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak, yang kemudian bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya.
5. Adanya koordinasi yang dapat menggerakkan serta memonitor kerja sama.
6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator
7. Adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak.

4). Fasilitas

Fasilitas merupakan hal-hal yang mempermudah pelaksanaan program. Dalam kaitannya dengan implementasi program yang dimaksud

dengan fasilitas adalah barang atau perlengkapan fisik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mempermudah dan memperlancar implementasi kebijakan. Fasilitas fisik dalam implementasi kebijakan merupakan sumber daya yang penting bagi implementasi kebijakan karena tanpa adanya perlengkapan fisik seperti bangunan, alat-alat maupun perlengkapan penyokong lainnya, implementasi mungkin tidak akan berhasil (Purnaweni, 1991: 26).

2.1.6 Pengawasan

Pengawasan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang pemimpin atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya memantau kegiatan yang dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Disini perlu dibedakan pengertian antara pengawasan dengan evaluasi. Pengawasan dimaksud disini adalah pemantauan (*monitoring*), yaitu pemantauan selama program atau kebijakan sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi adalah penilaian setelah program atau kebijakan itu selesai dilaksanakan.

Pemantauan (*monitoring*) menurut Dunn (1998: 28) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan dalam tahap *implementasi kebijakan*. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan atau program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan

implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

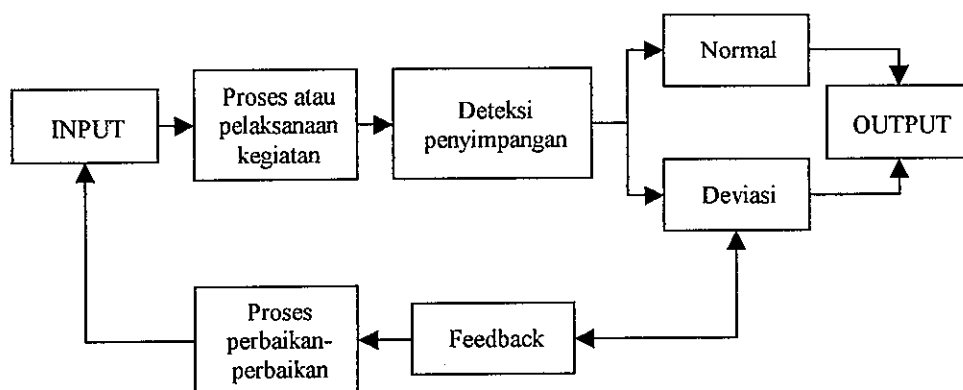
Untuk memberikan makna yang dalam akan pengawasan pada kegiatan organisasi Waluyo Ratam (dalam Bintoro, 1988: 41) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Menurut Situmorang dan Jakir (1994: 21) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dari kedua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan dimensi penting bagi terwujudnya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari sisi yang berbeda, namun dengan maksud yang sama Bintoro (1988: 9) menekankan pada segi fungsi dengan mengatakan bahwa pengawasan adalah fungsi yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sisi proses, pengawasan sebagaimana dikatakan oleh Sondang P. Siagian (dalam Silalahi, 1999: 172) adalah proses pengamatan dari keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengertian ini berarti kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan.

Meskipun demikian menurut Silalahi (1999: 177) kegiatan pengawasan tidak selalu diakhiri atau disertai dengan tindakan koreksi. Sebab apabila proses pengawasan berlangsung dengan mengukur hasil kerja dan membandingkan dengan standar, tetapi tidak menemukan adanya penyimpangan (sesuai dengan rencana) maka tindakan koreksi sudah tentu tidak mempunyai arti lagi. Dengan demikian langkah tindakan koreksi dilakukan hanya apabila terjadi penyimpangan dari yang sudah direncanakan. Melalui tindakan koreksi atau perbaikan atas suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja akan berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 2.6 Proses Pengawasan (diadaptasikan dari: Harold Koontz and Cyrill O'Donnell, McGraw Hill International Book Company, 1989 sebagaimana dikutip oleh Silalahi, 1999:178)

Dalam gambar 2.6 terlihat, bahwa apabila hasil deteksi terhadap proses atau pelaksanaan kegiatan tidak terjadi penyimpangan atau

berjalan normal, maka hasil kerja mencapai sasaran (*goal*). Sedangkan bila terjadi penyimpangan maka sasaran tidak akan tercapai sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan agar proses atau pelaksanaan kegiatan berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam kenyataannya, seperti dikatakan oleh Sujamto (1987:61) kata “pengawasan” itu dalam masyarakat kita selama ini sering dipakai dalam dua kategori pengertian. Kadang-kadang dipakai dalam arti luas dan kadang-kadang dalam arti sempit. Dalam arti luas, pengawasan meliputi suatu pengertian yang tercakup dalam fungsi *controlling* yang sebenarnya meliputi fungsi pengawasan dan pengendalian. Dengan kata lain, pengawasan dalam arti luas ini mencakup pengertian pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Seperti telah dikemukakan, bahwa proses atau pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak selalu disertai dengan tindakan koreksi melainkan hanya pada tahap menilai hasil kerja dan membandingkannya dengan standar. Disamping itu orang-orang yang melakukan pengawasan tidak selalu memiliki wewenang untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan atau penyelewengan yang terjadi kecuali melakukan tugas untuk menilai pelaksanaan kerja serta membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang ditentukan.

Adapun langkah-langkah dalam pengawasan yang perlu di tempuh menurut Silalahi (1999: 176) antara lain:

1. Menentukan obyek-obyek yang akan diawasi. Obyek-obyek yang akan diawasi perlu ditentukan dengan skala prioritas sesuai dengan urgensi

proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor strategis yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha.

2. Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki. Menetapkan suatu standar akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil yang nyata dapat diperbandingkan.
3. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan.
4. Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan, melalui observasi personil, laporan-laporan statistik, laporan lisan dan laporan tertulis.
5. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar apakah ada perbedaan.
6. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan memperbaiki jika ada kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan.

Agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu adanya sistem yang baik dari pengawasan tersebut. Sarwoto (1988: 99) mengutip pendapat William H. Newman mengatakan bahwa sistem pengawasan yang baik memerlukan beberapa syarat, antara lain:

- a). Harus memperhatikan atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi
- b). Harus menjamin adanya tindak perbaikan.

- c). Harus luwes.
- d). Harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di dalam mana pengawasan akan dilakukan.
- e). Harus ekonomis dalam hubungannya dengan biaya.
- f). Harus memperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan itu dimulai, yaitu :
 - Harus ada rencana yang jelas
 - Pola tata organisasi yang jelas.

Sedangkan untuk melakukan pengawasan yang baik menurut Sarwoto

(1988: 100) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, artinya pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang bersalah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
7. Pengawasan harus membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan baginya.

Adapun teknik-teknik pengawasan yang dapat dilakukan menurut G.R

Terry (dalam Sarwoto, 1988: 102) adalah sebagai berikut:

- a). Pengawasan Langsung, dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Bentuknya:
 - Inspeksi langsung

- Observasi di tempat
 - Laporan di tempat
- b). Pengawasan tidak langsung, dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Bentuknya:
- Laporan tertulis
 - Laporan lisan

Dari uraian di atas, berarti ada empat unsur penting yang menjadi bagian dari aspek pengawasan, yaitu :

- Aktivitas untuk mengetahui dan meneliti
- Pelaksanaan tugas
- Penilaian
- Sasaran yang hendak dicapai.

Di sini terlihat bahwa penekanan dari pengawasan adalah terletak pada proses pengawasan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa indikatornya antara lain :

1. Pengawasan umum, adalah pengawasan secara menyeluruh terhadap proses pengawasan mulai dari awal (tahap persiapan), sedang berlangsung proses, sampai tahap akhir.
2. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai.
3. Pengawasan represif, dilakukan melalui post audit, dengan memeriksa terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

2.1.7 Hubungan sikap dengan Implementasi

Dalam sikap terdapat tiga komponen (Irwanto,1991:260) yaitu: Pertama, adalan komponen kognitif, dimana sikap melibatkan proses evaluatif, baik membanding-bandingkan, menganalisis atau mendaya gunakan pengetahuan yang ada untuk memberikan suatu rangsang, komponen ini sangat penting artinya karena perubahan pada arah kognitif, seperti pengetahuannya pada objek tertentu akan merubah sikapnya.

Kedua adalah komponen afektif, dimana sikap melibatkan senang dan tidak senang serta perasaan emosional lain sebagai akibat atau hasil dari proses evaluatif yang dilakukan. Perasaan ini berpengaruh kuat pada perilaku seseorang.

Ketiga adalah komponen konatif atau perilaku, dimana sikap selalu di ikuti oleh kecenderungan untuk berpola perilaku tertentu. Ketidak cocokan perilaku seseorang dengan sikapnya disebut disonansi sikap, akan menimbulkan masalah psikologis pada individu yang bersangkutan sehingga ia akan berusaha merubah perilakunya atau sikapnya.

Dari ketiga komponen diatas dapat diketahui bahwa sikap merupakan dasar atau landasan seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dikaitkan dengan implementasi, implementasi merupakan pelaksanaan. Untuk melaksanakan sesuatu itu harus dengan perilaku atau tindakan, jadi tindakan apa yang akan dilakukan dalam implementasi tergantung dari sikap yang terbentuk.

Seperti dikatakan oleh George C. Edwards bahwa sikap merupakan faktor yang penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana

implementasi berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi jika sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.

Mengenai implementasi program KUKESRA sangat berkaitan dengan sikap. Jika masyarakat mempunyai sikap positif terhadap kebijakan tersebut dan yakin bahwa kebijakan tersebut menguntungkan baginya, maka tanpa paksaanpun mereka akan mendukung program. Namun bila mereka memiliki sikap negatif terhadap kebijakan tersebut maka mereka enggan melaksanakan sehingga implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

2.1.8 Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi

Sumber daya dapat dilukiskan sebagai masukan bagi organisasi yang kemudian melalui proses akan dirubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa. Sumber daya merupakan determinan bagi terlaksananya suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi.

Kebijakan atau program yang telah dirumuskan untuk dapat diimplementasikan selalu memerlukan sumber daya yang memadai apabila sumber daya tersebut tidak tersedia maka implementasi program tidak akan berhasil.

Selanjutnya Josep W. Eaton (1986 : 25) memberi definisi tentang sumber daya sebagai masukan-masukan yang oleh organisasi dirubah menjadi

produk-produk atau jasa-jasa untuk menambah kemampuan organisasi itu sendiri. Sumber daya merupakan sumber energi bagi organisasi.

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini meliputi tiga jenis yaitu: staff, informasi dan fasilitas. Tanpa adanya sumber daya tersebut maka pelaksanaan program tidak akan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

Sumber daya atau staf merupakan sumber daya terpenting karena manusialah yang pertama kali akan memproses sumber daya lainnya. Dengan kemampuan yang dimilikinya maka staff ini akan mampu menyampaikan informasi tentang program dengan lebih efektif, mampu menciptakan suatu iklim yang mendorong peserta binaan untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan mengembangkan dirinya untuk menggunakan segala sumber daya baik yang ada pada dirinya sendiri, sumber daya alam maupun fasilitas-fasilitas yang merupakan sumber daya buatan.

Selain sumber daya yang berupa sumber daya manusia, informasi dan fasilitas juga sangat penting bagi efektifitas pelaksanaan program KUKESRA. Walaupun memiliki jumlah staf yang memadai tapi tanpa sarana dan prasarana yang mendukung maka pelaksanaan program tersebut juga akan terhambat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kelancaran pelaksanaan suatu program.

2.1.9 Hubungan Pengawasan Dengan Implementasi

Salah satu indikasi keberhasilan program KUKESRA adalah peningkatan kesejahteraan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Mengingat beragam dan kompleksnya kegiatan yang saling terkait dan berintegrasi, sedangkan tingkat keberhasilan program itu sendiri diharapkan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka fungsi pengawasan sangat diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan memiliki beberapa fungsi, seperti yang dikatakan oleh Soewarno Handyaningrat (1983:38) yaitu :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Dengan pengawasan, maka aparat pelaksana dan pihak-pihak lain yang terkait bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur dan merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan program KUKESRA. Hal yang berkaitan dengan pengawasan adalah dengan rutinnya pelaporan dari tingkat bawah ke tingkat atasnya maka setiap saat dapat dipantau perkembangan program KUKESRA tersebut.

Melihat kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan maupun kelalaian dalam pengelolaan program KUKESRA maka pengawasan mutlak

diperlukan sebagai sarana efisiensi untuk mencapai keberhasilan program. Dengan demikian bila pengawasan dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh positif pada keberhasilan program KUKESRA. Sebaliknya jika pengawasan kurang maka tujuan program KUKESRA sulit untuk terwujud.

2.1.10 Hubungan Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan dengan Implementasi.

Seperti dikatakan oleh George C. Edward III (1980) bahwa sikap merupakan faktor yang penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana kebijakan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi jika sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.

Kebijakan atau program yang telah dirumuskan untuk dapat diimplementasikan selalu memerlukan sumber daya yang memadai. Apabila sumber daya tersebut tidak tersedia maka implementasi program tidak akan berhasil. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini meliputi tiga jenis, yaitu: staff, informasi dan fasilitas. Tanpa adanya sumber daya tersebut maka pelaksanaan program tidak akan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

Keberhasilan program KUKESRA diindikasikan dari meningkatnya kesejahteraan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Mengingat beragam dan kompleksnya kegiatan yang saling terkait dan berintegrasi, maka fungsi pengawasan sangat

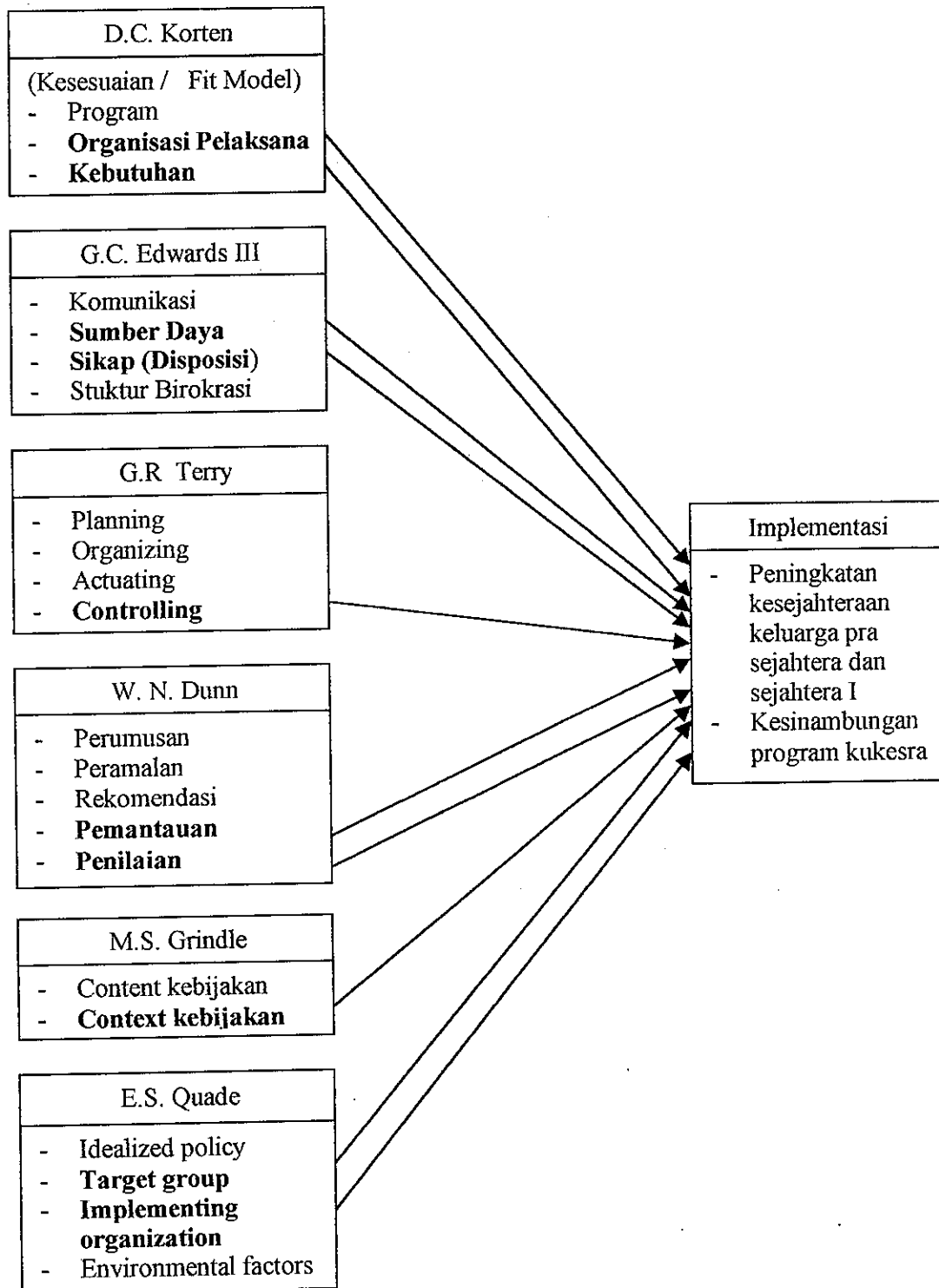
diperlukan. Di sini perlu dibedakan pengertian antara pengawasan dengan evaluasi. Pengawasan dimaksud di sini adalah pemantauan (*monitoring*), yaitu pemantauan selama program atau kebijakan sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi adalah penilaian setelah program atau kebijakan itu selesai dilaksanakan.

Menurut Dunn (1992: 28) pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan dalam tahap implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari sebuah kebijakan atau program.

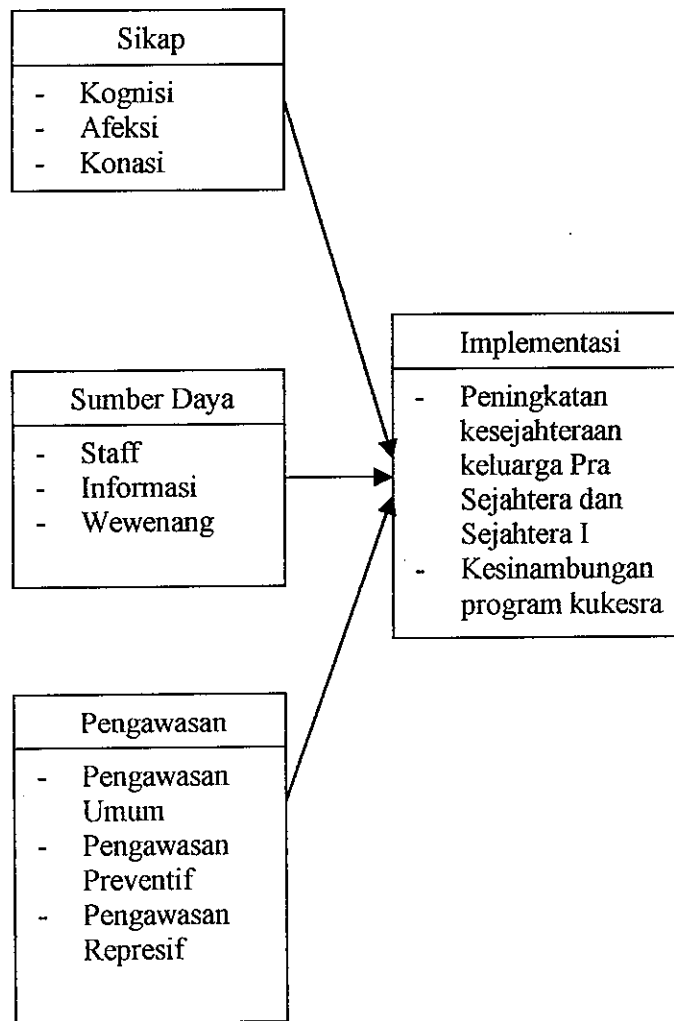
2.1.11. Model Kerangka Berpikir

Sebagai kristalisasi dari alur berpikir yang terdapat pada landasan teoritis ini maka penulis menduga bahwa kasus kegagalan dalam implementasi program KUKESRA di kabupaten Pematang Jaya itu berkaitan dengan rendahnya sikap, sumber daya dan pengawasan dalam pengucuran dana kredit, baik oleh masyarakat maupun aparat pelaksana di lapangan. Alur berpikir peneliti dapat dilukiskan dalam gambar berikut :

Gambar 2.7 Bangun Teori



Gambar 2.8 Model Kerangka Berpikir



2.2 Hipotesis Penelitian

Dengan demikian maka hipotesis yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah:

2.2.1. Hipotesis Minor.

A. Hipotesis Minor (H1):

“Ada hubungan yang signifikan antara variabel sikap dengan variabel tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”

B. Hipotesis Minor (H2):

“Ada hubungan yang signifikan antara variabel sumber daya dengan variabel tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”

C. Hipotesis Minor (H3):

“Ada hubungan yang signifikan antara variabel tingkat pengawasan dengan variabel tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”

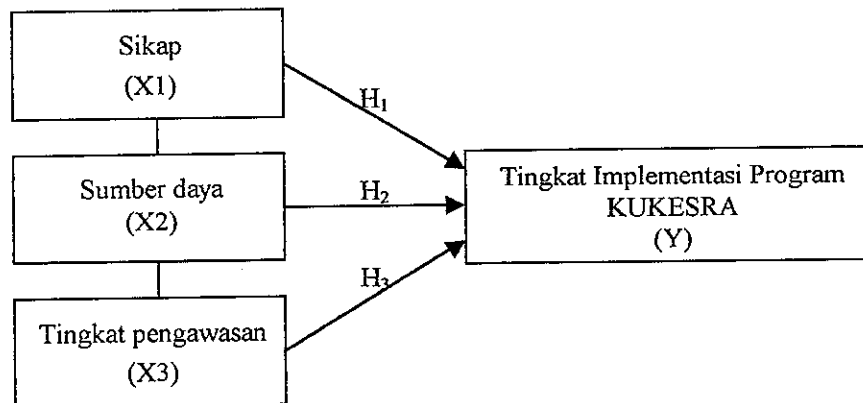
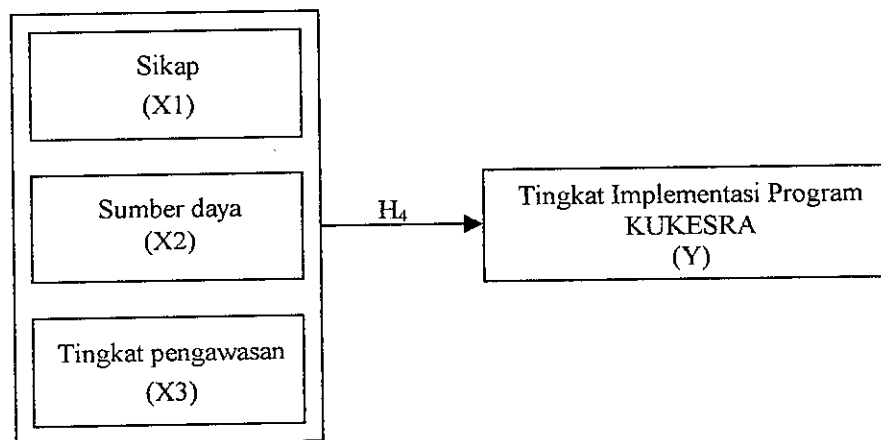
2.2.2. Hipotesis Mayor

Hipotesis Mayor (H4):

“Ada hubungan yang signifikan antara variabel sikap, sumber daya dan tingkat pengawasan secara bersama-sama dengan variabel tingkat implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”

Bila digambarkan dalam bentuk geometris maka hipotesis tersebut akan tampak sebagai berikut :

Gambar 2.9 Hipotesis Penelitian

A. Hipotesis Minor**B. Hipotesis Mayor**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian/Perspektif Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan dilengkapi analisa secara kualitatif. Teknik kuantitatif yang ditempuh adalah melalui survei. Sedangkan teknik kualitatifnya dilakukan melalui deskripsi dan eksplanasi terhadap hasil penelitian.

3.2. Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

Penelitian ini membatasi diri hanya pada variabel sikap, sumber daya dan tingkat pengawasan dan tingkat implementasi program KUKESRA di kecamatan Taman kabupaten Pemalang. Tidak menutup kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang juga berkaitan atau mempengaruhi kondisi variabel tingkat Implementasi program KUKESRA. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, berbagai variabel bebas tersebut misalnya tingkat komunikasi, tingkat sosialisasi, tingkat budaya dan sebagainya. Mengingat kompleksnya variabel bebas yang mempengaruhi implementasi sebuah program, maka di sini penulis membatasi diri hanya pada variabel bebas sikap, sumber daya dan tingkat pengawasan. Dengan asumsi bahwa ketiga variabel bebas tersebut merupakan variabel yang dominan

mempengaruhi kondisi variabel terikat yaitu tingkat implementasi program KUKESRA.

3.3 Lokasi Penelitian

Dari hasil pelaporan rutin menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan keluarga seperti UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dengan TAKESRA (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) ternyata sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya perencanaan keluarga dan perlunya sikap hidup mandiri. Namun demikian implementasinya belum berjalan dengan baik. Terbukti dengan masih banyaknya tunggakan KUKESRA yang ada di masyarakat.

Data perkembangan KUKESRA sampai dengan bulan Maret 2002 di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan KUKESRA di daerah non IDT sampai dengan bulan Maret 2002 penyerapannya sudah mencapai Rp. 23.100.652.535,- dari dropping sebesar Rp. 23.891.499.136,-.
- b. Perkembangan KUKESRA di daerah IDT sampai dengan bulan Maret 2002 penyerapannya sebesar Rp. 545.30.450,
- c. Tunggakan KUKESRA: di daerah non IDT total tunggakan KUKESRA sampai dengan maret 2002 adalah Rp. 6.613.551.579,- dari total

penyerapan. Untuk daerah IDT terdapat total tunggakan KUKESRA sebesar Rp. 160.245.250,-.

Dari 14 kecamatan penerima program KUKESRA, kemacetan (tunggakan) terbesar terjadi di wilayah kecamatan Taman yaitu sebesar 1,2 miliar rupiah (100 persen). Diikuti kecamatan Moga sebesar Rp. 682.188.559,- atau 97,97 persen dan kecamatan Bantar Bolang sebesar Rp. 312.489.242,- atau 96,86 persen.

Lokasi penelitian selanjutnya difokuskan pada kecamatan Taman dengan alasan bahwa penyerapan dana KUKESRA di kecamatan ini sangat tinggi yaitu 3,54 miliar rupiah (Maret, 2002). Namun demikian kemacetan (tunggakan) yang terjadi juga cukup besar yaitu lebih dari 1,2 miliar rupiah. Secara rinci tunggakan KUKESRA di kecamatan Taman sampai akhir bulan Maret 2002 dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Posisi Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman
(Maret 2002)

No	DESA	POSISI TUNGGAKAN			JUMLAH
		Kader (Rp)	Anggota (Rp)		
			Usaha Pailit	Gagal Panen	
1.	Sokawangi	54.237.464	7.799.753	3.138.253	65.175.470
2.	Gondang	59.657.819	8.408.112	9.290.452	77.356.383
3.	Jrakah	55.691.927	10.889.973	24.660.000	91.241.900
4.	Banjaran	41.033.374	3.947.950	4.825.273	49.806.597
5.	Jebed	169.430.295	15.731.283	29.292.000	214.753.578
6.	Cibelok	50.191.877	16.337.034	8.543.633	75.072.544
7.	Kaligelang	125.452.193	17.832.867	27.642.658	170.927.718
8.	Taman	76.429.880	7.848.183	18.321.995	102.600.058
9.	Banjardawa	19.912.281	6.539.645	--	26.451.926
10.	Pedurungan	85.366.214	16.974.075	6.601.032	108.941.321
11.	Beji	102.799.370	15.386.626	6.912.772	125.098.786
12.	Wanarejan	44.432.841	9.505.805	1.221.000	55.159.696
13.	Kedungbanjar	22.318.756	10.718.560	10.350.324	43.387.640
	JUMLAH	906.954.338	147.919.870	151.099.391	1.205.973.599

Sumber: BKKBN Kantor Kabupaten Pemalang, Maret 2002

Dari tabel terlihat bahwa posisi tunggakan ada pada kader dan anggota kelompok. Pada kader terjadi kemacetan sebesar Rp. 906.954.338,-. Sedangkan pada anggota, kemacetannya sebesar Rp. 299.019.261,-. Kemacetan pada anggota disebabkan karena usaha pailit dan gagal panen masing-masing sebesar Rp.147.919.870,- dan Rp.151.099.391,-.

Fenomena terjadinya gagal panen dan usaha pailit yang menyebabkan kerugian (tunggakan KUKESRA) sebesar Rp. 299.019.261,- menunjukkan bahwa implementasi program KUKESRA

(peningkatan kesejahteraan melalui usaha ekonomi produktif) belum tercapai. Disamping itu juga terjadi penyimpangan keuangan oleh kader KUKESRA sebesar Rp. 906.954.338,- yang menunjukkan bahwa program itu mengalami salah sasaran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang menyebabkannya?

Padahal di luar desa-desa (non IDT) penerima program KUKESRA itu masih ada enam desa lain (IDT) di wilayah kecamatan Taman yang tidak mengikuti program KUKESRA. Alasan mengapa mereka tidak mengikuti program KUKESRA akan diteliti dari sisi kualitatif. Namun setidaknya kasus yang terjadi di mayoritas desa-desa penerima program KUKESRA menunjukkan bahwa angka tunggakan KUKESRA itu sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program KUKESRA itu belum efektif.

3.4. Variabel Penelitian

Ada empat variabel utama yang menjadi fokus perhatian penelitian ini. **Variabel sikap** (selanjutnya disebut **variabel X1**), **variabel sumber daya** (selanjutnya disebut **variabel X2**), dan **variabel tingkat pengawasan** (selanjutnya disebut **variabel X3**) merupakan variabel bebas. Sedangkan **variabel tingkat implementasi program KUKESRA** merupakan variabel terikat, selanjutnya disebut **variabel Y**.

3.5. Definisi Konseptual

Ada penyulaman d. o 60 & d. 60
Lps pengabaran - apa.

Definisi konseptual dari masing-masing variabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Implementasi** adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.
- **Sikap** adalah konstelasi dari komponen kognitif yaitu proses evaluasi, komponen afektif yang melibatkan perasaan emosional untuk mendukung atau tidak mendukung suatu objek serta komponen konasi yang menentukan kesediaan atau kesiapan jawaban berupa tindakan atau pelaksanaan terhadap objek.
- **Sumber daya** adalah masukan-masukan bagi organisasi berupa staf atau pegawai, informasi, wewenang dan fasilitas melalui proses yang akan diubah menjadi produk-produk baik berupa barang atau jasa dalam rangka memberikan pelayanan publik.
- **Pengawasan** adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan memperbaiki jika ada kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan.

3.6. Definisi Operasional

1. **Implementasi program KUKESRA** (variabel Y) adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan program KUKESRA sampai dicapainya

hasil program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dengan indikator-indikator :

a). Kenyataan yang ada dari pelaksanaan program KUKESRA yang diukur dari:

1. Jumlah peserta KUKESRA yang ada dalam kelompok resipien.
2. Tingkat perkembangan jumlah anggota KUKESRA dalam satu bulan terakhir.
3. Jumlah dana yang terserap oleh kelompok resipien.
4. Tingkat penyerapan dana KUKESRA dibandingkan dengan perkiraan permintaan masyarakat (PPM).
5. Jumlah nominal dana KUKESRA yang terserap dan dimanfaatkan oleh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I .
6. Jumlah peminjam KUKESRA yang bukan berasal dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
7. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang mengembangkan usaha ekonomi produktif.
8. Tingkat perkembangan usaha ekonomi produktif dalam satu bulan terakhir.
9. Jumlah *penunggak kuning* dalam kelompok resipien.
10. Jumlah *penunggak merah* dalam kelompok resipien.
11. Tingkat perkembangan tahapan keluarga sejahtera dalam kelompok resipien.

12. Jumlah saldo TAKESRA dalam kelompok resipien.
- b). Kelestarian program KUKESRA yang diukur dari :
 1. Tingkat kebutuhan resipien akan program KUKESRA.
 2. Harapan resipien terhadap program KUKESRA.
2. **Sikap** (variabel X1) adalah konstelasi dari komponen kognitif, afektif dan konatif resipien (penerima program) KUKESRA, dengan indikator-indikator:
 - a). Proses kognisi resipien terhadap program KUKESRA yang terdiri dari persepsi, pendapat dan kepercayaan terhadap program. Bagian kognitif berkaitan dengan proses berfikir dengan tekanan khusus pada rasionalitas dan logika, yaitu suatu proses dengan mana resipien dalam pikirannya memahami tentang tujuan, maksud dan cara-cara program KUKESRA, mencakup :
 1. Tingkat pemahaman resipien tentang tujuan program KUKESRA.
 2. Tingkat pemahaman resipien tentang objek, sasaran program KUKESRA.
 3. Tingkat pemahaman resipien tentang jenis-jenis kegiatan dalam program KUKESRA.
 4. Tingkat pemahaman resipien tentang ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan program KUKESRA.
 5. Persepsi resipien terhadap pengaruh program KUKESRA bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat sasaran.

6. Tingkat kepercayaan resipien terhadap pencapaian tujuan program KUKESRA.
 - b). Komponen afeksi resipien KUKESRA setelah memahami program KUKESRA merupakan tanggapan emosional, pernyataan senang atau tidak senang resipien terhadap program KUKESRA, diukur dari :
 1. Tingkat kesenangan resipien terhadap adanya program KUKESRA.
 2. Tingkat kesenangan resipien terhadap aturan-aturan penyelenggaraan program KUKESRA dengan mekanisme penyaluran dananya.
 - c). Komponen perilaku resipien terhadap program KUKESRA.
 Komponen perilaku berhubungan dengan kecenderungan resipien untuk bertindak menghadapi program KUKESRA dalam cara tertentu. Dengan demikian perilaku merupakan komponen tindak dari sikap. Cara seseorang bertindak diukur dari:
 - Kesiediaan resipien untuk hadir dalam penyuluhan KUKESRA.
3. **Sumber-sumber daya** (variabel X2) adalah masukan-masukan bagi organisasi berupa staf atau pegawai, informasi, wewenang dan fasilitas yang tersedia dalam rangka pelaksanaan program KUKESRA yang secara operasional dapat dilihat melalui indikator:

a). *Staff/pegawai* , diukur melalui:

1. Tingkat penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dalam program KUKESRA.
2. Tingkat penguasaan materi oleh petugas dalam memberi pelatihan kewirausahaan.
3. Tingkat kemampuan petugas dalam menyampaikan pelatihan kewirausahaan.
4. Tingkat penggunaan alat bantu oleh petugas dalam pelatihan kewirausahaan.

b). *Informasi*, diukur melalui:

1. Tingkat kelengkapan informasi yang diterima resipien tentang tata cara pelaksanaan keterampilan kewirausahaan dalam program KUKESRA.
2. Tingkat kejelasan informasi yang dimiliki resipien tentang keterampilan kewirausahaan dalam program KUKESRA.
3. Tingkat ketepatan waktu informasi yang diterima oleh resipien dalam keterampilan kewirausahaan program KUKESRA.
4. Tingkat konsistensi informasi yang diterima resipien dalam keterampilan kewirausahaan program KUKESRA

c). *Wewenang*, diukur melalui:

1. Persepsi resipien tentang tingkat kewenangan aparat pelaksana (petugas PLKB) dalam menentukan jenis latihan kewirausahaan dalam program KUKESRA.
 2. Persepsi resipien tentang tingkat kewenangan aparat pelaksana (petugas PLKB) dalam mengawasi perkembangan kegiatan pelatihan kewirausahaan dalam program KUKESRA.
 3. Persepsi resipien tentang tingkat kewenangan aparat pelaksana (petugas PLKB) dalam menentukan materi pelatihan kewirausahaan dalam program KUKESRA.
4. **Pengawasan** (variabel X3) adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan program KUKESRA berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan memperbaiki jika terjadi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan. Variabel tingkat pengawasan ini selanjutnya diturunkan dalam indikator-indikator antara lain:
- a). Pengawasan Umum, yang diukur dari:
1. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas PLKB terhadap pelaksanaan program KUKESRA di lapangan.
 2. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok terhadap pinjaman anggota.
 3. Frekuensi laporan tentang KUKESRA yang dilakukan oleh Ketua Kelompok kepada petugas PLKB.

4. Bentuk laporan KUKESRA yang diberikan oleh Ketua Kelompok kepada petugas PLKB
- b). Pengawasan Preventif, yang diukur dari:
- Tingkat pemberian pengarahan-pengarahan mengenai KUKESRA kepada Ketua Kelompok selaku wakil dari individu-individu anggota KUKESRA
- c). Pengawasan Represif, yang diukur dari:
1. Frekuensi penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana KUKESRA.
 2. Frekuensi perbaikan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program KUKESRA

3.7. Jenis dan Sumber Data

Analisis data dalam penelitian ini berasal dari data primer maupun data sekunder. Data primer berasal dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara terhadap resipien maupun aparat pelaksana program KUKESRA. Sedangkan data sekunder didapat dari data-data tertulis mengenai perkembangan program KUKESRA di Kabupaten Pematang, baik dari instansi-instansi terkait maupun sumber-sumber di masyarakat serta bahan bacaan lain yang relevan.

3.8. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi untuk data primer dan studi literatur untuk data-data sekunder.

Untuk memperoleh instrumen penelitian yang sah dan andal diperlukan pengukuran reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal bila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun pengukuran validitas yaitu alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid bila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang harus diukur adalah variabel Sikap, Sumber daya, Pengawasan dan Implementasi Program KUKESRA.

Pengujian validitas tiap butir ditempuh dengan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor. Dalam analisis item ini Masrun (dalam Sugiyono, 2001:106) menyatakan "teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan." Selanjutnya dalam memberikan interpretasi atas koefisien korelasi, Masrun menyatakan "Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0,3$ ". Jadi kalau korelasi antara butir dengan

skor kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Adapun pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan *internal consistency* dengan teknik belah dua (*split half*). Kuesioner diujicobakan kepada 25 orang di luar sampel penelitian dengan 60 butir item pertanyaan. Untuk keperluan itu maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap

Hasil uji validitas dari butir-butir dalam kuesioner menunjukkan bahwa skor item dalam variabel Sikap, Sumber daya, Pengawasan dan Implementasi Program KUKESRA mempunyai korelasi positif dengan total skor item, karena lebih besar dari r tabel (0,396). Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas adalah 0,942. Karena nilai r tabel untuk derajat kebebasan (df) $25-2 = 23$ yaitu 0,396 lebih kecil daripada nilai korelasi hitung 0,942 maka pengujian menunjukkan bahwa item-item pertanyaan yang dibuat menunjukkan reliabel (ajeg).

3.9. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian yang nantinya akan digeneralisasikan. Dengan demikian yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh resipien program KUKESRA di kecamatan Taman, yang menurut catatan kantor BKKBN Pemalang tahun 2002 berjumlah 13.758 keluarga. Gambaran mengenai populasi penelitian ini dapat dilihat dalam tabel III.3.

Tabel III.2 Populasi Penelitian
(Resipien Program KUKESRA di Kecamatan Taman)

No	DESA	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	Kategori Anggota KUKESRA	
				Pra Sejahtera	Sejahtera I
1	Sokawangi	47	931	740	191
2	Gondang	30	734	360	374
3	Jrakah	49	1194	613	581
4	Banjaran	36	635	280	355
5	Jebed	85	2216	543	1673
6	Cibelok	41	766	316	450
7	Kaligelang	44	1039	596	443
8	Taman	57	1239	764	475
9	Banjardawa	20	363	121	242
10	Pedurungan	47	935	528	407
11	Beji	78	1662	977	685
12	Wanarejan	44	987	399	588
13	Kedungbanjar	34	1057	850	207
14	Penggarit	-	-	-	-
15	Pener	-	-	-	-
16	Sitemu	-	-	-	-
17	Kejambon	-	-	-	-
18	Kabunan	-	-	-	-
19	Asemdoyong	-	-	-	-
JUMLAH		617	13.758	7.087	6.671

Sumber: BKKBN Kantor Kabupaten Pemalang, Maret 2002

Penelitian ini memakai prosedur pengambilan sampel yang akan didasarkan pada jumlah kelompok yang ada. Hal ini mengingat mekanisme penyaluran dana KUKESRA itu sendiri yang tidak boleh lepas dari kelompok, dalam hal ini dikoordinir oleh ketua kelompok. Dengan demikian ketua kelompok dianggap mewakili individu-individu resipien KUKESRA yang menjadi anggotanya.

Penarikan sampel akan dilakukan secara acak berdasarkan klaster geografis (*cluster sampling*) setelah melalui beberapa tahap (*multi stage*). Dari satu kecamatan Taman dipecah ke dalam desa-desa. Desa-desa itu nantinya dipecah lagi ke dalam kelompok-kelompok resipien (penerima program) KUKESRA. Kelompok-kelompok ini selanjutnya dipecah menjadi kelompok-kelompok bermasalah (penunggak). Dan dari kelompok-kelompok bermasalah ini diambil sampel (responden) yang diwakili oleh

Ketua Kelompok. Sebab Ketua Kelompok inilah yang mengkoordinir penyaluran dana KUKESRA kepada para anggotanya.

Prosedur penarikan sampel dan persebarannya di tiap desa dapat dilihat dalam tabel III.3.

Tabel III.3 Proses penarikan Sampel

No	Desa	Jumlah Kelompok Penunggak	Sampel
1	Sokawangi	10	5
2	Gondang	10	5
3	Jrakah	9	5
4	Banjaran	10	5
5	Jebed	14	7
6	Cibelok	10	5
7	Kaligelang	6	3
8	Taman	8	4
9	Banjardawa	5	3
10	Pedurungan	9	5
11	Beji	11	6
12	Wanarejan	7	4
13	Kedungbanjar	14	7
	JUMLAH	123	64

Sumber: data penelitian, diolah.

Jumlah sampel ditetapkan sebesar 64. Proporsi sampel untuk tiap desa ditarik secara berstrata (*stratified random sampling*). Menurut Suparmoko (1991 : 27) setelah populasi dikelompokkan dalam strata, maka suatu random sampling dapat ditempuh untuk masing-masing strata. Dalam hal ini yang dimaksud strata adalah desa.

Adapun proses penarikan sampel dalam setiap strata secara manual adalah sebagai berikut:

1. Desa Sokawangi: $(10 \times 62) : 123 = 5,04$ dibulatkan = 5
2. Desa Gondang : $(10 \times 62) : 123 = 5,04$ dibulatkan = 5
3. Desa Jrakah : $(9 \times 62) : 123 = 4,53$ dibulatkan = 5
4. Desa Banjaran : $(10 \times 62) : 123 = 5,04$ dibulatkan = 5
5. Desa Jebed : $(14 \times 62) : 123 = 7,06$ dibulatkan = 7

6. Desa Cibelok : $(10 \times 62) : 123 = 5,04$ dibulatkan = 5
7. Desa Kaligelang: $(6 \times 62) : 123 = 3,02$ dibulatkan = 3
8. Desa Taman : $(8 \times 62) : 123 = 4,03$ dibulatkan = 4
9. Desa Banjardawa: $(5 \times 62) : 123 = 2,52$ dibulatkan = 3
10. Desa Pedurungan: $(9 \times 62) : 123 = 4,53$ dibulatkan = 5
11. Desa Beji : $(11 \times 62) : 123 = 5,54$ dibulatkan = 6
12. Desa Wanarejan : $(7 \times 62) : 123 = 3,53$ dibulatkan = 4
13. Desa Kedungbanjar: $(14 \times 62) : 123 = 7,06$ dibulatkan = 7

Dengan demikian total jumlah resipien yang ditarik sebagai sampel adalah 64 orang. Angka 62 dalam perhitungan sampel diperoleh dari 10% dari jumlah kelompok, yaitu 617 atau 61,7 dibulatkan menjadi 62.

3.10. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kuesioner, wawancara dan observasi langsung. Di luar informasi yang didapat dari resipien selaku responden, penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data yang berasal dari aparat pelaksana (petugas PLKB dan Kepala BKKBN). Dengan demikian diharapkan ada semacam *cross check* yang saling melengkapi dalam hal data/informasi dari resipien dan badan-badan pelaksana program.

3.11. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik statistik inferensial untuk menarik kesimpulan tentang ada tidaknya hubungan di antara

variabel-variabel penelitian. Adapun bobot penilaian (skoring) terhadap opsi yang diberikan dalam tiap pertanyaan (kuesioner) akan dihitung dengan menggunakan skala data ordinal. Bobot penilaian didasarkan pada **kualitas** jawaban dengan empat kategori nilai yang disusun secara bertingkat dengan memakai urutan skala Likert. Adapun urutan nilai tersebut adalah:

- Skor 4, untuk jawaban yang mendukung.
- Skor 3, untuk jawaban yang cukup mendukung.
- Skor 2, untuk jawaban yang kurang mendukung.
- Skor 1, untuk jawaban yang tidak mendukung.

Informasi kuantitatif, selanjutnya dianalisis dan dipahami maknanya dengan bantuan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan data yang diperoleh yang pengukurannya menggunakan skala ordinal, maka analisa statistik yang dipakai adalah analisis regresi liner sederhana. Teknik stasitik regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dirubah. Dalam regresi sederhana, jumlah variabel independen sebagai predictor hanya satu dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y bila X sama dengan 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Adapun persamaan matematisnya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Dimana:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y bila X sama dengan 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

$X_{1,2,3,\dots,n}$ = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya adalah koefisien determinasi dan koefisien

korelasi. Koefisien determinasi diberi simbol r^2 dan koefisien korelasi diberi simbol r . Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Adapun koefisien korelasi (r) menunjukkan keeratan hubungan linear antara variabel satu dengan variabel lain.

Interpretasi atas koefisien korelasi (r) yang didapat akan mengacu kepada pedoman dari Sugiyono (2002: 216) sebagai berikut:

Tabel III.4 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2002:216)

Untuk memastikan apakah keeratan hubungan tersebut bermakna (signifikan), maka dilakukan pengujian terhadap koefisien korelasi tersebut. Dalam penelitian ini nilai F hasil perhitungan statistik (F hitung) selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai F pada tabel (F tabel). Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 0,05 berarti signifikan, hipotesis nol ditolak. Sebaliknya bila F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 0,05 berarti tidak signifikan, hipotesis nol diterima. Pengolahan data (perhitungan statistik) dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan *Statistics Package for Social Sciences (SPSS) 10 for Windows*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV. 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Taman terletak di daerah pesisir pantai utara Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduknya kurang lebih 105.279 orang terdiri dari 26.926 laki-laki dan 78.353 perempuan (Monografi Kecamatan Taman, 2002).

Tabel IV.1 Penduduk Kecamatan Taman Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Prosentase
1	Petani (Pemilik tanah)	6.210	5,9
2	Petani (Penggarap tanah)	9.140	8,68
3	Peternak	2.404	2,28
4	Nelayan	3.440	3,27
5	Pengusaha Sedang/Besar	1.871	1,78
6	Pengrajin/Industri Kecil	2.350	2,23
7	Buruh Industri	8.750	8,31
8	Buruh Bangunan	2.550	2,42
9	Buruh Perkebunan	78	0,07
10	Pedagang	500	0,47
11	Jasa Pengangkutan	5.557	5,28
12	Pegawai Negeri Dipil (PNS)	1.010	0,95
13	TNI/ POLRI	540	0,51
14	Pensiunan (PNS/TNI/POLRI)	950	0,90
15	(Lain-lain)/ Perantauan	59.929	56,92
	Total	105.279	100,00

Sumber: Diolah dari Monografi Kecamatan Taman, 2002

Dari tabel IV.1 terlihat bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Taman (56,92%) memiliki mata pencapaian sebagai perantauan. Artinya jumlah penduduk Kecamatan Taman yang bekerja di luar daerahnya seperti merantau ke luar kota Jakarta, Bandung, Semarang dan sebagainya adalah sebanyak 56,92%. Proporsi ini

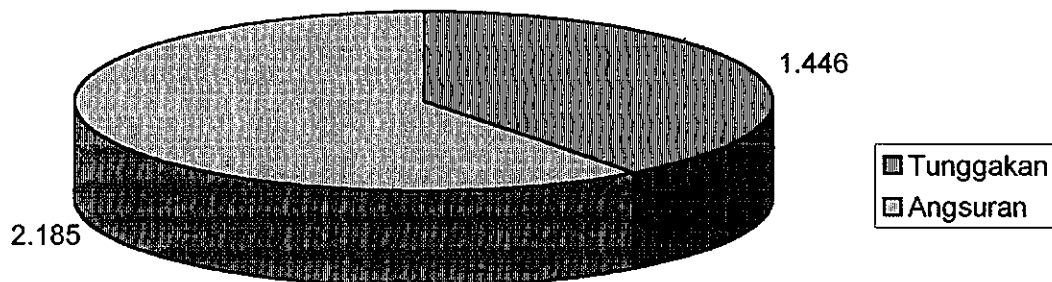
selanjutnya diikuti dengan jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani (penggarap tanah) sebanyak 8,68% dan buruh industri sebanyak 8,31%.

Program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA) dilaksanakan di Kecamatan Taman sejak tahun 1997. Sampai awal tahun 2002 telah menyerap resipien (masyarakat penerima program) sebanyak 13.758 orang. Sesuai dengan acuan normatifnya fasilitas kredit KUKESRA diberikan kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha/ UPPKS dan memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera TAKESRA.

Melalui program KUKESRA diharapkan dapat ditingkatkan upaya pemberdayaan keluarga dalam membina ketahanan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga taraf hidup keluarga dan masyarakat semakin meningkat dan makin mempunyai keuletan dan ketangguhan dalam mewujudkan peran dan kedudukan perempuan agar menjadi mitra yang sejajar dengan kaum pria. Pembangunan fungsi ekonomi keluarga itu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan wanita melalui kegiatan ekonomi produktif dalam kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

UPPKS adalah kelompok kegiatan dari para keluarga dalam wadah Paguyuban Keluarga Sejahtera, melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga, beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II dan seterusnya baik yang sudah menjadi akseptor KB maupun anggota masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan Keluarga Sejahtera.

Gambar IV.1 Realisasi Penyerapan KUKESRA di Kecamatan Taman, Juni 2002



Sumber : BKKBN Pemalang, 2002

Dari gambar IV.1 di atas terlihat bahwa realisasi penyerapan KUKESRA di Kecamatan Taman pada bulan Juni 2002 telah mencapai angka 3,63 milyar rupiah lebih. Melihat tingginya angka penyerapan KUKESRA semestinya kesejahteraan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dapat ditingkatkan dengan usaha ekonomi produktif (kewirausahaan) yang menjadi semangat dari program KUKESRA. Namun pada kenyataannya hal itu belum sepenuhnya terwujud.

Observasi yang dilakukan menemukan bahwa implementasi program KUKESRA masih rendah. Salah satu di antaranya adalah adanya fenomena *salah sasaran*. Wujud dari *salah sasaran* tersebut adalah munculnya kelompok-kelompok fiktif dalam pengucuran dana KUKESRA. Dari pengakuan para petugas PLKB yang menjadi pembina program KUKESRA di Kecamatan Taman diketahui bahwa dalam

satu desa saja paling tidak terdapat sepuluh kelompok fiktif. Para petugas PLKB tidak bisa berbuat banyak karena kondisi tersebut merupakan dampak dari upaya *kejar target* penyerapan dana KUKESRA pada tahun-tahun sebelumnya.

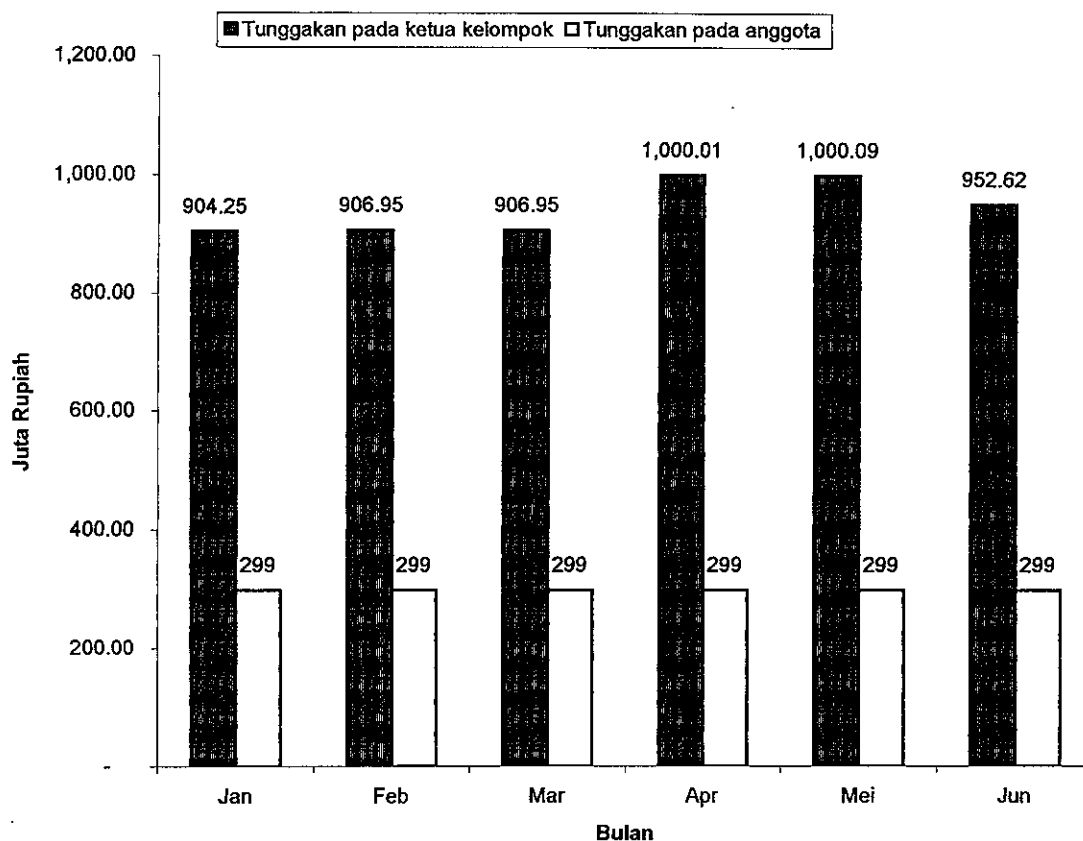
Kelompok fiktif adalah kelompok penerima kredit KUKESRA yang tidak memiliki anggota sebagaimana yang ditentukan dalam acuan program. Kelompok fiktif biasanya muncul dalam dua bentuk. *Pertama*, ketika kelompok-kelompok KUKESRA dengan anggota-anggota dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tidak lagi mampu membayar angsuran, sehingga dilunasi dulu oleh Ketua Kelompok yang berasal dari Keluarga Sejahtera III. Setelah lunas, Ketua Kelompok mengajukan jumlah pinjaman yang lebih besar atas nama kelompok untuk kemudian dipakai sendiri. *Kedua*, kelompok fiktif juga bisa terjadi karena masyarakat Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I di lingkungan yang bersangkutan enggan mengajukan kredit KUKESRA. Keengganan ini dilatarbelakangi dengan adanya rasa takut dan ketidaktahuan tentang kredit yang akan diperoleh. Sebagai gantinya ada anggota masyarakat dari Keluarga Sejahtera III yang memanfaatkan dengan cara meminjam foto copy KTP dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk membentuk kelompok fiktif dan mengajukan pinjaman KUKESRA.

Temuan selama penelitian menunjukkan bahwa fenomena kelompok fiktif lebih banyak muncul dalam bentuk yang pertama. Ketua Kelompok melunasi pinjaman dari anggota yang macet kemudian mengajukan pinjaman yang lebih besar untuk kepentingan sendiri. Banyaknya kelompok-kelompok macet yang dilunasi oleh Ketua Kelompok menyebabkan jumlah kelompok-kelompok fiktif itu semakin besar.

Padahal dengan semakin banyaknya bantuan kredit yang mengucur pada satu orang, maka resiko kemacetan yang terpusat pada satu tangan juga semakin besar.

Kasus tunggakan KUKESRA (salah sasaran) senilai lebih dari 40 juta rupiah di desa Kaligelang Kecamatan Taman dapat dijadikan sebagai contoh. Ibu Tri Asihningrum (35 tahun) Kader/ Ketua Kelompok dari Keluarga Sejahtera III dengan mengatasnamakan 14 kelompok fiktif, mendapatkan bantuan kredit KUKESRA dalam jumlah yang cukup besar. Saat ini total tunggakan KUKESRA yang ada di tangannya mencapai lebih dari 40 juta rupiah. Tunggakan ini termasuk dalam kategori tunggakan merah (Observasi, 2002). Masih dari desa yang sama, Sudamulyati (40 tahun) Kader/ Ketua Kelompok dari Keluarga Sejahtera III dengan mengatasnamakan empat kelompok fiktif berhasil mendapatkan bantuan senilai 17,26 juta rupiah. Tanpa diikuti dengan usaha ekonomi produktif yang memadai sebagai sarana pengembalian hutang, kini dia harus menanggung beban tunggakan dalam jumlah yang cukup besar. (Observasi, 2002).

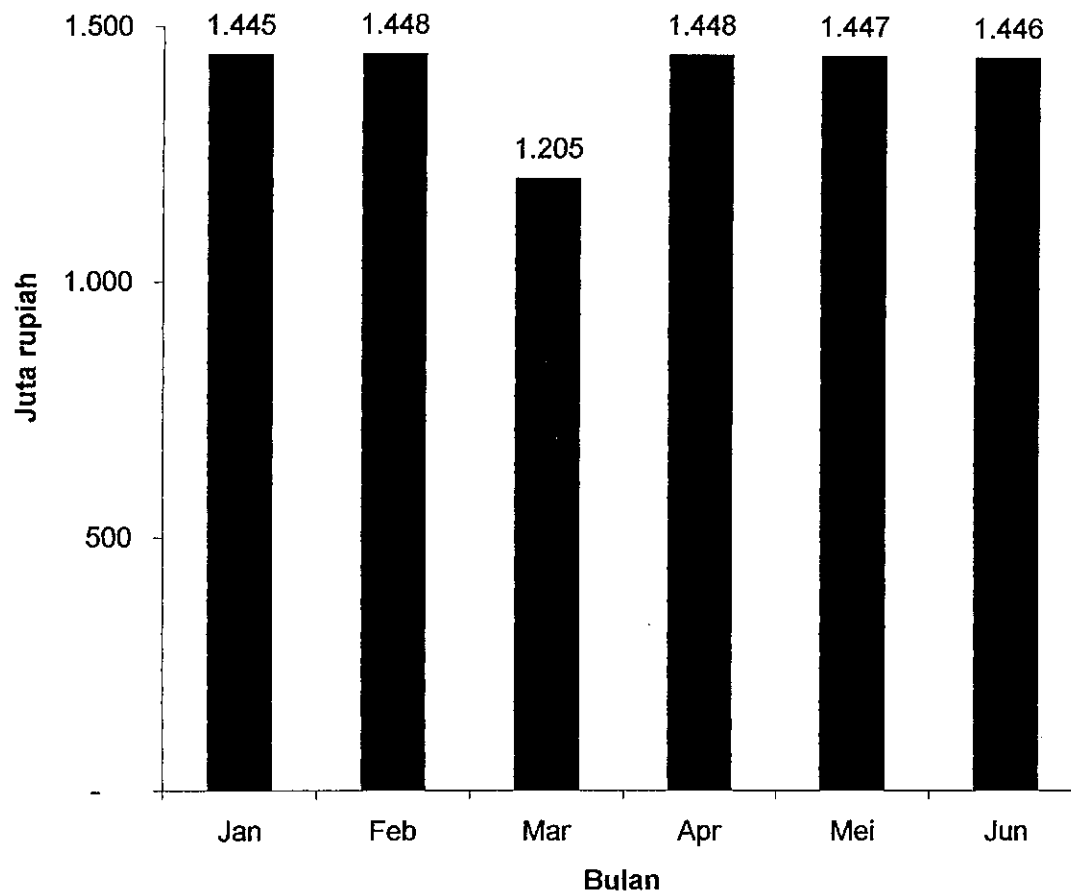
Gambar IV.2 Perkembangan Tunggakan KUKESRA didasarkan pada posisi tunggakan di Kecamatan Taman, Bulan Januari 2002 sampai dengan Juni 2002



Sumber : BKKBN Pemalang, 2002

Pada gambar IV.2 di atas terlihat bahwa kasus salah sasaran dalam penyaluran dana KUKESRA di Kecamatan Taman cukup besar. Besarnya kasus salah sasaran ini mengindikasikan lemahnya manajemen program yang tidak didukung dengan pengawasan yang memadai. Apabila dikembalikan pada teori tentang manajemen program sebagaimana dikatakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (1997: 81) maka struktur manajemen program ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Gambar IV.3 Perkembangan Tunggakan KUKESRA di Kecamatan Taman, Bulan Januari 2002 sampai dengan Juni 2002

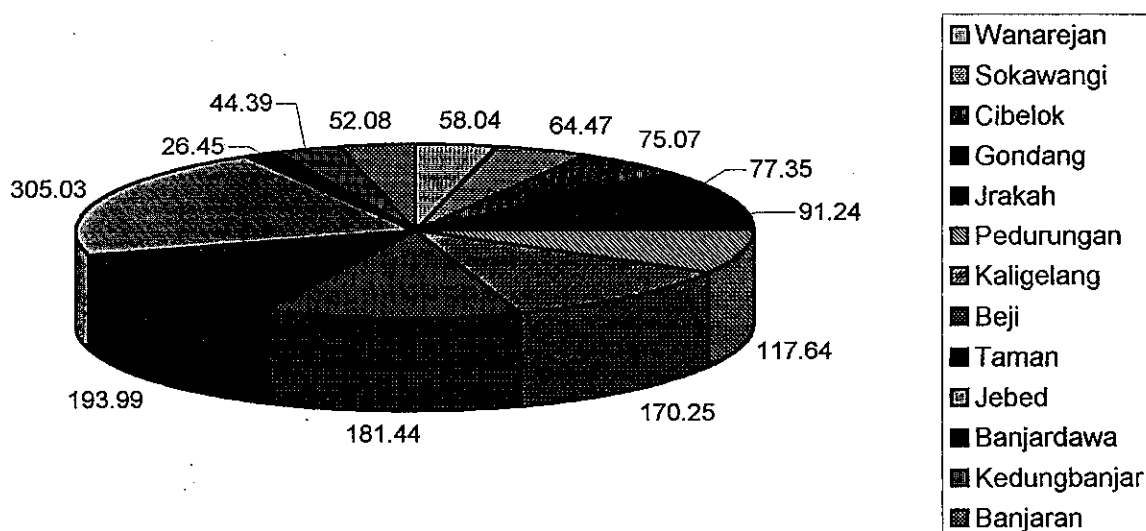


Sumber : BKKBN Pemalang, 2002

Dari gambar IV.3 di atas terlihat bahwa angka tunggakan KUKESRA masih cukup tinggi. Upaya menekan tunggakan yang sempat berhasil pada bulan Maret 2002 kemudian mengendur kembali dengan peningkatan tunggakan yang cukup tajam. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh beban hidup yang semakin bertambah tanpa diimbangi dengan usaha ekonomi produktif sebagai sarana pengembalian hutang.

Berkaitan dengan persebaran tunggakan KUKESRA ternyata angka tunggakan KUKESRA tertinggi ada pada kelompok-kelompok usaha (UPPKS) desa Jebed, yaitu sebesar 305,03 juta rupiah. Hal ini bisa dimengerti karena jumlah kelompok UPPKS desa Jebed merupakan yang terbanyak se-kecamatan Taman, yaitu 85 kelompok dengan anggota 2.271 keluarga (BKKBN Pemalang, 2002).

Gambar IV.4. Proporsi tunggakan KUKESRA per desa se-Kecamatan Taman, Juni 2002.



Sumber : BKKBN Pemalang, 2002

Gambar IV.4 di atas menjelaskan bahwa proporsi tunggakan sangat bervariasi tergantung pada jumlah kelompok yang meminjam dana KUKESRA. Tapi tidak semua pengucuran dana KUKESRA itu mengalami salah sasaran. Sebagian resipien berupaya memanfaatkan bantuan kredit KUKESRA untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha ekonomi produktif. Jenis usahanya bermacam-macam seperti pedagang *engklek*, ternak, kerajinan tangan dan lain-lain.

Tabel IV.2 Jenis Usaha Sambilan

Usaha Sambilan	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1. Dagang Engklek	22	34,38
2. Dagang Kain	8	12,5
3. Ternak	2	3,13
4. Kerajinan Tangan	8	12,5
5. Makanan Kecil	3	4,69
6. Tanaman Hias	1	1,56
7. Warung Telekomunikasi (Wartel)	1	1,56
8. Tak ada Usaha Sambilan	19	29,69
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari kuesioner penelitian (identitas responden)

Dari tabel IV.2 di atas terlihat bahwa mayoritas penerima dana KUKESRA (34,38%) melakukan usaha sambilan sebagai pedagang *engklek* (warung kecil-kecilan). Sisanya melakukan kegiatan beternak (3,13%), makanan kecil (4,69%), kerajinan tangan (12,5%) dan lain-lain. Namun demikian perlu dicermati bahwa jumlah responden yang tidak memiliki usaha ekonomi produktif yang jelas masih cukup besar, yaitu 29,69%. Padahal melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) usaha ekonomi produktif yang bersifat kecil-kecilan itu diarahkan agar menjadi penopang dalam ketahanan dan kemandirian ekonomi rumah tangga.

Tabel IV.3 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Responden	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1. Sekolah Dasar (SD)	21	32,81
2. Sekolah Menengah Pertama	28	43,75
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)	14	21,88
4. Perguruan Tinggi (Diploma)	1	1,56
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari kusioner penelitian (identitas responden)

Dari tabel IV.3 diatas terlihat bahwa jumlah responden yang berpendidikan SMP adalah yang paling besar, yaitu 43,75%. Diikuti dengan responden yang berpendidikan SD sebanyak 32,81%. Ini artinya dari sisi pendidikan formal saja

kualitas pendidikan responden masih rendah. Belum lagi penguasaan mereka terhadap dunia kewirausahaan masih dipertanyakan. Padahal salah satu kendala yang dirasakan dan merupakan titik lemah sehingga kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan anggota UPPKS kurang berjalan lancar adalah karena kurangnya pengetahuan mereka di bidang kewirausahaan.

Upaya pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan keluarga untuk mengentaskan diri dari keterbelakangan sosial dan ekonominya. Program KUKESRA menempatkan kaum perempuan sejajar dengan kaum pria untuk melakukan usaha ekonomi produktif dalam rangka menopang ketahanan ekonomi rumah tangga.

Tabel IV.4 Tingkat Penghasilan Keluarga

Banyaknya Penghasilan (perbulan)	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Di bawah Rp. 100.000,-	10	15,62
Antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,-	32	50
Di atas Rp. 500.000,-	22	34,38
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari kusioner penelitian (identitas responden)

Dari tabel IV.4 terlihat bahwa sebagian besar responden masih memiliki tingkat penghasilan yang rendah, yaitu di bawah Rp. 100.000,-. Padahal jumlah tanggungan dalam keluarga resipien umumnya lebih dari empat orang. Dengan kondisi seperti itu maka resipien masih baru sebatas mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Mereka masih berada pada fase Keluarga Pra Sejahtera atau Keluarga Sejahtera I. Mereka belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, apalagi kebutuhan pengembangannya.

4.2 Hasil Penelitian

Bab ini akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden sebanyak 64 orang resipien program KUKESRA. Secara keseluruhan, bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang meliputi variabel Implementasi Program KUKESRA, Sikap, Sumber Daya, dan Pengawasan.

4.2.1 Implementasi Program KUKESRA

Implementasi Program KUKESRA mengacu kepada pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan program sampai dicapainya hasil program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Mengawali penggalan informasi tentang program KUKESRA, responden diminta untuk menjawab pertanyaan tentang peningkatan jumlah peserta KUKESRA dalam kelompoknya.

Tabel IV.5 Peningkatan Jumlah Peserta KUKESRA

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Meningkat tajam	-	-
Meningkat tipis	1	1,6
Ajag (tetap)	62	96,9
Menurun	2	3,1
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 37

Pada tabel IV.5 di atas ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,9% responden menjawab jumlah peserta KUKESRA dalam kelompoknya relatif “tetap”. Jumlah anggota dalam satu kelompok KUKESRA umumnya sama yaitu sekitar 20 orang. Hanya 3,1% atau dua orang yang mengaku jumlah anggotanya mengalami

penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi kelompok dari sisi jumlah anggota cukup besar.

Tabel IV.7 Perkembangan Usaha Ekonomi Produktif

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Meningkat tajam	5	7,81
Sedikit meningkat	11	17,19
Ajag (tetap)	24	37,5
Menurun	24	37,5
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 44.

Dari tabel IV.6 tersebut diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab "ajeg" adalah 37,5%. Jumlah ini sama dengan jumlah responden yang menjawab "menurun", yaitu sebanyak 37,5%. Sebagian kecil responden lainnya (17,19%) menjawab bahwa usaha ekonomi produktif mereka mengalami sedikit peningkatan. Hanya lima persen responden saja yang mengaku bahwa usaha ekonomi mereka meningkat tajam. Itupun karena basis ekonominya yang relatif kuat (keluarga Sejahtera III Plus). Temuan ini menjadi indikasi bahwa jumlah anggota yang besar ternyata tidak diikuti dengan kegiatan usaha ekonomi produktif yang memadai.

Kemitraan yang menjadi semangat kewirausahaan dalam program KUKESRA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal sesuai acuan normatif (BKKBN, 1994: 8-9), pembinaan dan pengembangan kegiatan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) dilaksanakan dengan prinsip kemitraan melalui koordinasi dan kerja sama pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat itu sendiri. Kemitraan dengan BUMN, Bank, Pengusaha swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diberikan dalam bentuk dukungan dana, pelatihan ketrampilan, promosi dan pemasaran.

Salah satu contoh kemitraan yang pernah dijalankan adalah antara Kelompok “Mekarsari” desa Taman Kecamatan Taman dengan pengusaha emping melinjo “Ibu Wasis” Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang. Sesuai kesepakatan, Kelompok “Mekarsari” harus membeli bahan baku emping melinjo dari “Ibu Wasis”. Kemudian sebagai pengusaha yang cukup besar “Ibu Wasis” akan membantu dalam bidang pemasaran. Tapi dalam pelaksanaannya, kemitraan itu tidak berjalan. Karena “Ibu Wasis” selaku mitra usaha melanggar kesepakatan. Emping melinjo hasil produksi Kelompok “Mekarsari” dibeli dengan harga lebih rendah. Selain itu bantuan kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 25 juta rupiah untuk Kelompok “Mekarsari” juga tidak disampaikan. Kasus ini menjadi pengalaman buruk bagi kelompok KUKESRA “Mekarsari” untuk bermitra usaha (Observasi, 2002).

Tabel IV.7 Jumlah “Penunggak Merah”

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Menurun drastis	4	6,25
Sedikit menurun	10	15,63
Ajeg (tetap)	42	65,63
Meningkat	8	13,33
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari pertanyaan nomor 48.

Berdasarkan tabel IV.7 di atas dapat dikatakan bahwa jumlah *penunggak merah* (yaitu penunggak KUKESRA yang telah melebihi waktu jatuh tempo) cukup besar sebanyak 42 orang atau 65%. Sisanya sebanyak 15,63% responden menjawab bahwa jumlah penunggak di kelompoknya mengalami sedikit penurunan. Di pihak lain sejumlah delapan orang responden atau 13,33% justru mengatakan bahwa jumlah penunggak di kelompoknya mengalami peningkatan. Tingginya jumlah penunggak

ini boleh jadi disebabkan oleh merosotnya kewirausahaan yang dijalankan oleh para resipien KUKESRA.

Tabel IV.8 Peningkatan Tahapan Keluarga Sejahtera

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Pra Sejahtera dan KS I menjadi KS III	1	1,56
Pra Sejahtera dan KS I menjadi KS II	45	70,31
Keluarga Sejahtera II ke KS III	-	-
Tidak Ada Perubahan	18	28,13
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 49

Sesuai dengan tabel IV.8 diatas maka secara umum program KUKESRA telah mampu meningkatkan tahapan Keluarga Sejahtera resipiennya. Paling tidak dari tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi Keluarga Sejahtera II sebanyak 70,31%. Sedangkan 28,13% responden lainnya justru mengatakan tidak ada perubahan sama sekali setelah menerima program KUKESRA. Responden dari kalangan ini mengatakan bahwa selain dari program KUKESRA mereka juga mendapatkan fasilitas program PDMDKE dan P2KP. Temuan ini menjadi indikasi bahwa program KUKESRA belum cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel IV.9. Perkembangan TAKESRA

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Meningkat tajam	12	18,75
Meningkat sedikit	27	42,19
Ajag (tetap)	25	39,06
Menurun	-	-
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 50.

Pada tabel IV.9 di atas terlihat bahwa Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA) mengalami sedikit peningkatan. Sebanyak 42,2% responden menjawab bahwa tabungan TAKESRA mereka mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan itu berkisar dalam angka puluhan ribu rupiah. Sementara 39,06% responden lainnya mengatakan bahwa tidak ada kemajuan dalam tabungannya. Kondisi ini mengisyaratkan adanya *kemandegan* (stagnansi) dalam tabungan TAKESRA.

Tabel IV.10 Tingkat Kebutuhan akan KUKESRA

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Sangat butuh	-	-
Butuh	40	62,5
Kurang butuh	16	25
Tidak butuh	8	12,5
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 51

Dari tabel IV.10 di atas terlihat bahwa tingkat kebutuhan resipien akan dana KUKESRA ternyata masih cukup tinggi. Ini terbukti dengan banyaknya responden yang menjawab “butuh” yaitu sebesar 62,5%. Bahkan dalam penuturannya beberapa responden mengharapkan agar bantuan kredit KUKESRA itu lebih ditingkatkan. Tetapi perlu dicermati kenyataan bahwa sebanyak 25% responden menjawab “tidak butuh” terhadap program KUKESRA.

Mencermati dinamika empiris yang terjadi ini maka sulit untuk membantah kebenaran teori pelebagaan program dari David C. Korten (1988) yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu program terjadi bila terdapat kesesuaian antara berbagai faktor. Salah satu di antaranya adalah **kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat sasarnya**. Fenomena pemusatan tunggakan KUKESRA pada Kader/Ketua Kelompok yang berasal dari Keluarga Sejahtera III dan

keengganan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk meminjam dana KUKESRA merupakan indikasi bahwa program KUKESRA belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

4.2.2 Sikap

Bagian ini akan mendeskripsikan sikap dari responden selaku resipien program KUKESRA. Sikap disini mengacu kepada konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif responden terhadap program KUKESRA. Dari berbagai indikator variabel Sikap, akan diulas beberapa indikator yang dianggap dominan mempengaruhi kondisi variabel tersebut.

Tabel IV.11 Pengetahuan Responden tentang Tujuan Program KUKESRA

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase(%)
Tahu	4	6,25
Cukup tahu	31	48,44
Kurang tahu	27	42,19
Tidak tahu	2	3,13
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 1

Bila dilihat dari tabel IV.11 diatas ternyata sebanyak 48,44% responden tergolong dalam kategori “cukup tahu”. Artinya ebagian besar responden sudah mengetahui bahwa program KUKESRA itu bertujuan untuk membantu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk meningkatkan tahapan keluarga sejahtera melalui usaha ekonomi produktif. Sisanya sebesar 42,19% responden tergolong “kurang mengetahui” tujuan program KUKESRA.

Tabel IV.12 Pengetahuan Responden tentang Aturan-aturan KUKESRA

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Tahu	1	1,56
Cukup tahu	41	64,06
Kurang tahu	14	21,88
Tidak tahu	8	12,5
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 4

Pengetahuan responden tentang aturan-aturan program KUKESRA sebagaimana terekam dalam tabel IV.12 di atas ternyata sebanyak 64,06% responden tergolong dalam kategori “cukup tahu”. Artinya mayoritas responden memahami bahwa aturan-aturan KUKESRA antara lain adalah pengajuan pinjaman dilakukan secara berkelompok yang anggotanya terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Pinjaman itu diberikan secara bertahap dengan bunga *flat equivalent* (sama dengan/setara) suku bunga efektif sebesar 6% per tahun. Setiap pinjaman akan dipotong sebesar 10% untuk dimasukkan dalam rekening Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA) kelompok/anggota yang bersangkutan.

Dalam implementasi kebijakan diperlukan pembentukan persepsi yang baik di kalangan resipien. Hal ini mutlak diperlukan mengingat suatu kebijakan dihadapkan pada dua kemungkinan utama, yaitu mendapat dukungan atau penolakan. Sehingga pemahaman yang baik terhadap kebijakan akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Mann (dalam Azwar, 1988:18) menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Asumsi dasarnya adalah bahwa kepercayaan mempengaruhi perilaku. Kecenderungan

berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini akan membentuk sikap individual.

Tabel IV.13 Kepercayaan Responden terhadap KUKESRA dalam Peningkatan Kesejahteraan

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Pasti dapat meningkatkan	36	56,25
Mungkin dapat meningkatkan	20	31,25
Tidak meningkat	5	7,81
Tidak tahu	3	4,69
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 5

Dari tabel IV.13 di atas diketahui bahwa sebanyak 56,25% responden percaya bahwa program KUKESRA “pasti dapat meningkatkan” kesejahteraan mereka. Sedangkan 31,25% responden lainnya percaya bahwa program KUKESRA “mungkin dapat meningkatkan” kesejahteraan. Hanya sekitar lima orang atau 7,8% yang tidak mempercayai program KUKESRA. Sisanya sebesar 4,68% atau tiga orang menagku “tidak tahu”.

Dengan demikian di kalangan masyarakat sasaran umumnya telah terbentuk keyakinan akan niat baik pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat penerima program (resipien) KUKESRA menyadari bahwa program ini sangat bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Kondisi ini sebenarnya cukup potensial untuk membentuk sikap-sikap yang positif bagi keberhasilan implementasi program KUKESRA.

Tabel IV.14 Kepercayaan Responden terhadap Keberhasilan Tujuan Program

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Pasti tercapai	26	40,63
Kemungkinan besar tercapai	25	39,06
Kecil kemungkinan tercapai	9	14,06
Tidak tahu	4	6,25
Total	64	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 7

Sesuai dengan tabel IV.14 di atas ternyata sebanyak 40,63% responden percaya bahwa tujuan program KUKESRA “pasti tercapai”. Sedangkan 39,06% responden menjawab “kemungkinan besar tercapai”. Sisanya sebanyak 14,06% responden mengatakan bahwa tujuan program KUKESRA “kecil kemungkinan tercapai”. Hanya empat orang responden atau 6,25% saja yang menjawab “tidak tahu”. Kondisi ini mencerminkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap efektifitas program KUKESRA.

Dalam studi kepustakaan mengenai sikap sebagaimana dijelaskan oleh Louis Thurstone dan Charles Osgood (dalam Mar’at, 1984: 23) sikap merupakan bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Pada umumnya reaksi emosional yang merupakan bagian dari komponen afektif banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang kita percaya sebagai benar bagi objek tertentu, dalam hal ini program KUKESRA. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki perasaan yang positif (senang) terhadap program KUKESRA.

Tabel IV.15. Perasaan Responden terhadap Program KUKESRA

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Sangat senang	20	31,25
Cukup senang	43	67,19
Kurang senang	1	1,56
Tidak senang	-	-
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 8

Pada tabel IV.15 di atas ternyata sebagian besar responden menyatakan sikap positifnya terhadap program. Mereka yang menyatakan “sangat senang” adalah sebanyak 20 orang atau 31,25% dan yang menyatakan “cukup senang” sebanyak 43 orang atau 67,19%. Hanya satu orang responden saja yang menyatakan “kurang senang” terhadap program KUKESRA. Mereka yang menyatakan senang terhadap program KUKESRA didasari alasan bahwa kredit KUKESRA relatif mudah didapat dengan tanpa memakai agunan (jaminan). Sedangkan pihak yang “kurang menyenangi” program KUKESRA memiliki alasan bahwa kredit KUKESRA tidak mendidik resipiennya untuk berwirausaha dengan baik.

Tabel IV.16 Kesiediaan Responden Hadir dalam Penyuluhan

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Selalu bersedia	14	21,88
Bersedia	50	78,12
Kurang bersedia	-	-
Tidak bersedia	-	-
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 10

Dari tabel IV.16 di atas ternyata terlihat bahwa kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan individu yang membentuk sikapnya untuk hadir dalam penyuluhan-penyuluhan KUKESRA. Dalam

kenyataannya, sebanyak 50 orang responden atau 78,13% bersedia untuk hadir dalam penyuluhan-penyuluhan. Sisanya sebanyak 21,87% bahkan akan “selalu bersedia” menghadiri penyuluhan-penyuluhan KUKESRA. Hal ini menyiratkan adanya konsistensi antara kepercayaan sebagai komponen kognitif, perasaan sebagai komponen afektif dan kecenderungan perilaku sebagai komponen konatif yang melahirkan sikap positif untuk hadir dalam pertemuan penyuluhan KUKESRA.

4.2.3 Sumber Daya

Berdasarkan teori pokok yang telah disebutkan dimuka bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor kritis yang menghambat atau memperlancar kebijakan. Salah satu di antara faktor-faktor kritis itu adalah sumber daya. Dalam penelitian ini sumber daya mengacu kepada masukan-masukan bagi program berupa petugas PLKB, wewenang dan informasi yang dimiliki untuk melaksanakan program KUKESRA.

Tabel IV.17. Responden Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Ya	12	18,75
Tidak	52	81,25
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 12

Temuan penelitian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel IV.17 diatas ternyata sebagian besar responden yaitu sebanyak 52 orang atau 81,25% menjawab “tidak mengikuti” pelatihan kewirausahaan. Sedangkan sisanya sebanyak 12 orang atau 20,31% menjawab “ya” (mengikuti pelatihan kewirausahaan). Artinya jumlah resipien yang mengikuti pelatihan kewirausahaan jauh lebih sedikit.

Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari minimnya pengadaan pelatihan kewirausahaan. Padahal sesuai dengan kebijakan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat disebutkan bahwa salah satu kendala yang dirasakan dan merupakan titik lemah sehingga kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan anggota UPPKS kurang berjalan lancar adalah karena kurangnya pengetahuan mereka di bidang kewirausahaan (BKKBN, 1995: 1). Namun ternyata dalam pelaksanaannya di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Data penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 51 orang responden atau 79,69% mengatakan tidak mengetahui pelatihan. Hanya sejumlah 13 orang atau 20,31% yang mengetahui pelatihan. Menurut Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terdapat kebijakan dalam implementasi pelatihan, yaitu dengan sistem perwakilan. Artinya tidak semua anggota kelompok diikutsertakan, tetapi hanya anggota tertentu saja dengan harapan akan menularkan pengetahuan yang didapatkan pada anggota yang lain (Observasi, 2002). Namun kenyataannya transfer pengetahuan itu tidak terjadi.

Apabila dikembalikan kepada tataran normatifnya, maka strategi BKKBN dalam pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah dengan pemberian pelatihan. Pelatihan ini perlu untuk menyiapkan kelompok secara matang dan memberikan sumbangan terhadap keberhasilan UPPKS. Mengacu kepada kebijakan BKKBN maka semestinya penyiapan UPPKS dilaksanakan dengan pematangan kelompok, pelatihan dasar dan pembinaan pasca pelatihan.

Salah satu pelatihan kewirausahaan yang pernah diadakan adalah “Pelatihan Manajemen dan Bantuan Peralatan Industri Kecil Emping Melinjo” oleh BKKBN bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 sampai dengan 3 Nopember 2000. Peserta pelatihan berasal dari anggota-anggota kelompok KUKESRA desa Taman dan sekitarnya sebanyak 20 orang. Sebagai sebuah proses belajar kegiatan ini diarahkan bagi anggota keluarga dalam rangka meningkatkan profesionalisme kewirausahaan terutama dalam industri emping melinjo yang menjadi komoditi masyarakat setempat.

Selain pembekalan materi (teori) pelatihan itu juga dilengkapi dengan praktek dan pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan berupa alat-alat industri emping melinjo seperti alas jemur, wajan, serok, alat press, alat sablon, paku, dan kapak batu. Melalui pembekalan seperti itu diharapkan para anggota, kader, petugas dan pengelola program memiliki pengetahuan kewirausahaan mengenai perencanaan, pengambilan keputusan, penggunaan waktu dan pemasaran yang memadai.

Minimnya frekuensi pelatihan yang diadakan dan terbatasnya jumlah peserta KUKESRA yang mengikutinya menyebabkan penggalian informasi mengenai variabel Sumber Daya mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu antara lain berkait dengan jumlah responden yang terlalu sedikit dan keterbatasan pengetahuan mereka mengenai kewirausahaan. Namun dari sejumlah kecil responden itu dapat diperoleh gambaran seperti yang tersaji dalam tabel 4.19.

Tabel IV.18 Penilaian Responden tentang Materi Kewirausahaan dalam Pelatihan KUKESRA

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Sangat memadai	3	25
Cukup memadai	7	58,44
Kurang memadai	1	8,33
Tidak memadai	1	8,33
Total	12	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 13.

Dilihat dari tabel 4.18 ternyata sebagian besar responden menilai bahwa materi kewirausahaan yang disampaikan dalam pelatihan sudah memadai. Tetapi perlu diperhatikan adanya responden yang kurang puas terhadap materi pelatihan. Ketidakpuasan itu berkaitan dengan pendeknya waktu pelatihan tanpa dilengkapi dengan praktek kewirausahaan yang mencukupi.

Kenyataan ini belum sesuai dengan garis kebijakan BKKBN (1994:25) yang menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan permodalan dan usaha kelompok UPPKS maka perlu ditingkatkan keterampilan para pengurus dan anggotanya secara terus menerus dan berkesinambungan. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha, baik secara individu maupun kelompok di kemudian hari. Materi yang disampaikan dalam pembinaan harus sesuai dengan kebutuhan pengurus atau anggotanya, diantaranya: cara-cara pengolahan bahan mentah untuk berproduksi, manajemen keuangan, pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan dan lain-lain.

Tabel IV.19 Penilaian Responden terhadap Kemampuan Petugas

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Sangat memadai	1	8,33
Cukup memadai	9	74,9
Kurang memadai	1	8,33
Tidak memadai	1	8,33
Total	12	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 14

Dalam tabel IV.19 terlihat bahwa sebanyak sembilan orang responden atau 75% dari yang mengikuti pelatihan, merasa puas dengan kemampuan petugas. Hanya sebagian kecil saja responden yang tidak puas dengan kemampuan petugas. Mereka beranggapan bahwa kewirausahaan bukanlah bidang dari petugas PLKB sehingga mereka kurang yakin dengan kemampuannya.

Banyak kelompok usaha ekonomi produktif mempunyai hasil produksi barang atau jasa yang baik, namun produksi barang atau jasa tersebut hanya terjual sedikit saja. Apalagi kalau hasil produksi barang atau jasa yang dimilikinya mempunyai kualitas yang kurang memenuhi selera konsumen. Untuk itu informasi (gambaran) tentang pangsa pasar kemana barang atau jasa yang akan dihasilkan itu, seharusnya sudah dipikirkan sehingga apabila kegiatan telah menghasilkan barang atau jasa sudah ada yang akan memanfaatkannya. Informasi tentang pemasaran ini diperlukan untuk mengurangi resiko usaha yang akan dilakukan, mengetahui masalah yang ada di pasar, dan membaca peluang yang ada untuk dimanfaatkan dengan baik.

Tabel IV.20 Penilaian Responden tentang Kelengkapan Informasi Kewirausahaan

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Sangat lengkap	1	83,33
Cukup lengkap	8	66,67
Kurang lengkap	2	16,67
Tidak lengkap	1	8,33
Total	12	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 15

Sesuai dengan tabel IV.20 di atas dalam implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman ternyata ditemukan bahwa sebanyak delapan orang responden atau 66,66% yang mengikuti pelatihan kewirausahaan menilai bahwa informasi tentang kewirausahaan yang disampaikan sudah cukup lengkap. Hal ini bahwa kebutuhan akan informasi kewirausahaan telah dianggap cukup oleh resipien (responden) yang mengikuti pelatihan KUKESRA.

Tabel IV. 21 Penilaian Responden tentang Ketepatan Waktu Informasi Kewirausahaan

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Tepat waktu	10	83,33
Agak terlambat	2	16,67
Terlambat	-	-
Sangat terlambat	-	-
Total	12	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 19

Pada tabel IV.21 diatas maka dari sisi “tepat waktu” informasi kewirausahaan yang diterima resipien, ternyata sebanyak 10 orang responden atau 83,38% beranggapan bahwa informasi yang diterima sudah tepat waktu. Artinya di saat mereka harus menghadapi pasar yang makin dinamis dan kompetitif yang memerlukan pemasaran yang aktif, informasi tentang kewirausahaan itu muncul.

Pemasaran merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan UPPKS. Keberhasilan pemasaran akan menentukan kelangsungan kegiatan ekonomi produktif. Bimbingan kewirausahaan melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang berwawasan bisnis, yaitu dengan kegiatan petik, olah, dan jual (pelaju) keluarga untuk kegiatan pertanian dan proses, kemas, jual (pelaju) keluarga untuk kegiatan non pertanian.

Konsepsi Pelaju Keluarga (petik, olah, jual dan untung oleh keluarga), yaitu mengolah hasil pertanian yang telah dipetik/ dipungut untuk selanjutnya dikemas dengan baik dan dijual. Misalnya pengolahan keripik pisang, emping melinjo, pembuatan tempe dan lain-lain. Sedangkan Pemaju Keluarga (petik, kemas, jual dan untung oleh keluarga) berkaitan dengan proses bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tinggi dan mengemasnya untuk dijual. Melalui pemberian informasi, pengetahuan dan keterampilan yang konsisten dengan acuan normatif diharapkan usaha ekonomi produktif lebih maju dan berkembang.

Tabel IV.22 Konsistensi Informasi tentang Kewirausahaan

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Sesuai	11	91,67
Belum sesuai	1	8,33
Tidak sesuai	-	-
Tidak sesuai sama sekali	-	-
Total	12	100,00

Sumber: Diolah dari pertanyaan nomor 20

Dari tabel IV.22 terlihat bahwa mayoritas responden menilai informasi tentang kewirausahaan yang diterimanya sudah konsisten (sesuai) satu sama lain. Sebanyak 11 orang responden atau 91,67% menjawab “sesuai”, artinya ada

kesinambungan informasi dalam pelatihan kewirausahaan yang diikuti. Dengan demikian temuan ini relevan dengan sudut pandang teori implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (1997) yang menyebutkan bahwa sebuah program atau peraturan harus jelas dan konsisten karena merupakan sarana legal bagi para pelaksananya untuk mengerahkan sumber daya.

Dalam tahap persiapan pemberian dana KUKESRA itu sendiri diadakan penyiapan petugas yang dimaksudkan agar semua jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan KUKESRA memiliki wawasan yang sama tentang KUKESRA serta dapat melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan perannya. Kegiatan itu antara lain adalah orientasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Salah satu peran PLKB adalah membina dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif melalui wadah kelompok usaha (BKKBN, 1997: 23).

Tabel IV.23 Kewenangan Petugas PLKB untuk Menentukan Jenis Latihan Kewirausahaan

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Berwenang penuh	7	58,33
Berwenang sebagian	2	16,67
Tidak berwenang	3	25
Tidak tahu	-	-
Total	12	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 21

Pada tabel IV.23 di atas berkaitan dengan kewenangan petugas PLKB dalam menentukan jenis latihan kewirausahaan ternyata sebanyak tujuh orang responden atau 58,33% dari yang mengikuti pelatihan menganggap bahwa petugas PLKB “berwenang penuh” untuk menentukan jenis latihan. Sebanyak dua orang responden atau 16,67% menilai “berwenang sebagian” dan sisanya sebanyak tiga orang atau

25% menganggap petugas PLKB “tidak berwenang” untuk menentukan jenis latihan kewirausahaan dalam program KUKESRA.

Mencermati temuan di atas, ternyata persepsi responden mengenai kewenangan petugas PLKB dalam menentukan jenis latihan kewirausahaan cukup beraneka ragam. Meskipun mayoritas responden menganggap bahwa petugas PLKB memiliki kewenangan, namun sebagian lagi beranggapan bahwa petugas PLKB tidak memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan di bidang kewirausahaan. Sehingga mereka menganggap perlu adanya instansi terkait lainnya yang lebih memahami masalah-masalah kewirausahaan untuk ikut serta melatih kewirausahaan pada kelompok-kelompok KUKESRA.

Kondisi seperti ini sudah diantisipasi oleh BKKBN (1994: 29) dengan menegaskan bahwa agar upaya pembinaan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu melibatkan berbagai unsur terkait baik pemerintah maupun swasta, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan usaha kelompok UPPKS. Adapun unsur terkait dimaksud adalah:

- Unsur pemerintah antara lain Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi dan PPK, BUMN dan Bank.
- Unsur swasta antara lain para pengusaha yang berkaitan dengan pelaksanaan proses produksi dan pemasaran hasil.

Untuk mengetahui perkembangan kelompok UPPKS dilaksanakan monitoring melalui sistem pencatatan dan pelaporan UPPKS dengan menggunakan

formulir yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan pembinaan Keluarga Sejahtera Gerakan KB Nasional yang berlaku.

Tabel IV.24 Petugas PLKB Mengawasi Kewirausahaan

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Berwenang penuh	8	66,67
Berwenang sebagian	4	33,33
Tidak berwenang	-	-
Tidak tahu	-	-
Total	12	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 22

Sesuai dengan tabel IV.24 diatas ternyata berkaitan dengan pengawasan perkembangan kewirausahaan dalam KUKESRA oleh petugas PLKB, responden yang menjawab “berwenang penuh” sebanyak delapan orang atau 66,67% dari jumlah peserta pelatihan. Sedangkan sisanya sebanyak empat orang atau 33,33% dari peserta pelatihan menjawab “berwenang sebagian”. Artinya mayoritas responden menganggap bahwa petugas PLKB berwenang untuk mengawasi perkembangan kewirausahaan kelompok-kelompok KUKESRA.

4.2.4 Pengawasan

Peninjauan atau pemeriksaan pinjaman KUKESRA oleh petugas PLKB merupakan bagian dari upaya pembinaan agar pelayanan KUKESRA dapat berjalan dengan lancar serta memberikan dampak kepada pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh keluarga. Pembinaan diarahkan baik pada keluarga penerima KUKESRA, pengurus kelompok usaha/ UPPKS maupun kepada petugas yang terlibat dalam pelayanan KUKESRA.

Tabel IV.25 Peninjauan/ Pemeriksaan oleh PLKB Kepada Kelompok

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Selalu melakukan	30	46,88
Sering melakukan	31	48,44
Kadang-kadang	3	4,69
Tidak pernah melakukan	-	-
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 24

Sesuai tabel IV.25 diatas ternyata pengakuan responden mengenai petugas PLKB yang “sering melakukan” peninjauan/pemeriksaan pinjaman KUKESRA pada kelompok adalah sebanyak 31 orang atau 48,44%. Ukuran “sering” adalah minimal satu kali pemeriksaan/peninjauan tiap bulan. Adapun responden yang menjawab “selalu melakukan” adalah 30 orang atau 46,88%. Batasan “selalu” adalah lebih dari satu kali pemeriksaan setiap bulan. Sisanya sebanyak tiga orang atau 4,69% meniali “kadang-kadang” petugas PLKB memeriksa pinjaman kelompok mereka.

Ternyata terlihat bahwa secara umum pemeriksaan/ peninjauan yang dilakukan oleh petugas PLKB relatif memadai. Pembinaan yang dilakukan kepada kelompok usaha/ UPPKS ditujukan agar kelompok tersebut dapat berjalan dengan dinamis dan berkembang menjadi semakin efektif sebagai wadah pembinaan kewirausahaan, kemitrausahaan dan sarana pelayanan KUKESRA. Pembinaan terpadu dilakukan oleh BKKBN, Bank BNI, PT. Pos Indonesia dan instansi pemerintah serta instistusi lain yang terkait melalui kelompok kerja fungsional (pokjanal) dan kelompok kerja teknis (pokjanis).

Tabel IV.26 Peninjauan/pemeriksaan Oleh Ketua Kelompok kepada Anggota KUKESRA

Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Selalu melakukan	11	17,19
Sering melakukan	45	70,31
Kadang-kadang	7	10,94
Tidak pernah melakukan	1	1,56
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 25

Dari tabel IV.26 di atas terlihat bahwa peninjauan atau pemeriksaan pinjaman juga oleh pengurus/ Ketua Kelompok UPPKS dan PLKB serta petugas lapangan dari instansi pemerintah, institusi/ lembaga lain yang terkait melalui kegiatan kelompok maupun kunjungan rumah. Dalam prakteknya responden yang mengakui bahwa Ketua Kelompok “selalu melakukan” peninjauan/pemeriksaan pinjaman kepada anggota adalah sebanyak 11 orang atau 17,19%. “Selalu melakukan” artinya dalam satu bulan terjadi lebih dari dua kali peninjauan. Sedangkan responden yang mengaku bahwa Ketua Kelompok “sering melakukan” peninjauan/pemeriksaan pinjaman kepada anggota adalah sebanyak 45 orang atau 70,31%. Batasan “sering melakukan” adalah dalam satu bulan minimal terdapat satu kali peninjauan/pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan peninjauan/pemeriksaan pinjaman baik kepada kelompok maupun anggota KUKESRA berjalan lancar.

Untuk memperoleh data dan informasi kegiatan TAKESRA dan KUKESRA maka BKKBN (1994:44) melakukan pemantauan melalui pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Ketua Sub PPKBD (Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa) atau Ketua Kelompok melakukan pencatatan terhadap para anggota kelompok ke dalam form yang sudah disediakan serta melaporkannya kepada PPKBD melalui pertemuan rutin bulanan.
- PPKBD setiap akhir bulan membuat laporan mengenai TAKESRA dan KUKESRA untuk diketahui dan ditandatangani oleh petugas PLKB (penyuluh Lapangan Keluarga Berencana). Selanjutnya laporan tersebut dikirimkan kepada Pengawas PLKB dengan tembusan kepada Kepala Desa/ Lurah setiap empat bulan.
- Pengawas PLKB (PPLKB) membuat laporan berdasarkan masukan dari PPKBD dan mengirimkannya kepada kantor BKKBN kabupaten/ kota dengan tembusan kepada Camat setiap bulan.
- Kantor BKKBN kabupaten/ kota kemudian membuat laporan berdasarkan masukan dari PPLKB kepada Kantor Meneg Kependudukan/ BKKBN Pusat dengan tembusan ke BKKBN Propinsi (Bidang Bina Program) setiap bulan.
- Kantor BKKBN Propinsi selanjutnya melaporkan kepada kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN Pusat (Biro Pelaporan dan Statistik) setiap bulan.

Tabel IV. 27 Membuat laporan kepada Petugas PLKB

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Setiap bulan	58	90,63
Setiap dua bulan	1	1,56
Setiap tiga bulan	2	3,13
Tidak pernah	3	4,69
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 26

Dalam kenyataannya sesuai dengan tabel IV.27 diatas responden yang juga Ketua Kelompok KUKESRA telah melaksanakan pembuatan laporan kepada petugas PLKB secara periodik. Jumlah responden yang mengaku membuat laporan “setiap bulan” kepada petugas PLKB adalah sebanyak 58 orang atau 90,63%. Hanya tiga orang responden yang menjawab “tidak pernah” membuat laporan kepada petugas PLKB. Ini artinya secara umum Ketua Kelompok KUKESRA telah menjalankan kewajiban formalnya untuk melaporkan perkembangan KUKESRA di kelompoknya.

Tabel IV.28 Bentuk laporan kepada Petugas PLKB

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Tertulis dan lisan	18	28,13
Tertulis	8	12,5
Lisan	35	54,69
Lain-lain	3	4,69
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 27

Pada tabel IV.28 diatas mengacu kepada dimensi normatif maka idealnya bentuk laporan KUKESRA yang disampaikan kepada petugas PLKB adalah laporan tertulis. Hal ini penting karena merupakan dokumentasi agar pembinaan dan monitoring dalam pelayanan KUKESRA dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh kelompok. Tetapi dalam kenyataannya ternyata sebagian besar responden (54,69%) hanya melaporkan secara “lisan” perkembangan KUKESRA di kelompoknya kepada petugas PLKB. Sisanya sebanyak delapan orang atau 12,5% membuat laporan secara tertulis. Sedangkan yang lain sebanyak 18 orang atau 28,13% responden menyusun laporan secara “tertulis dan lisan” kepada petugas PLKB.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program KUKESRA maka tiap keluarga resipien perlu diarahkan agar pinjaman KUKESREA yang diperoleh benar-benar bermanfaat. Bantuan itu diperlukan untuk mengatasi hambatan sosio kultural, seperti rasa malu, rendah diri, rendah diri, putus asa dan lain-lain yang diakibatkan oleh keterbelakangannya selama ini.. Selain itu diberikan pula bimbingan pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan usaha ekonomi produktif melalui kelompok-kelompok usaha/ UPPKS. Dengan demikian sikap, motivasi dan semangat berwirausaha di kalangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang menjadi resipien program KUKESRA dapat ditumbuhkembangkan.

Tabel IV.29 Responden menerima pengarahan-pengarahan KUKESRA

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Selalu diberikan	33	51,56
Sering diberikan	27	42,19
Kadang-kadang	4	6,25
Tidak pernah	-	-
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 28

Pada tabel IV.29 diatas ternyata praktek di lapangan menunjukkan bahwa pengarahan-pengarahan diberikan oleh petugas PLKB dalam rangka KUKESRA, ternyata sebanyak 33 responden atau 51,56% menjawab “selalu diberikan”. Sementara 27 orang responden lainnya atau 42,19% menjawab “sering diberikan”. Batasan “selalu diberikan” adalah frekuensi pengarahan lebih dari dua kali setiap bulan. Sedangkan “sering diberikan” berarti dalam satu bulan minimal terdapat satu kali pengarahan. Bila pengarahan-pengarahan itu diberikan secara tidak teratur

(periodik setiap bulan) maka digolongkan dalam kategori “kadang-kadang”. Responden yang menjawab “kadang-kadang” hanya sebanyak tiga orang atau 6,25%.

Monitoring melalui sistem pencatatan dan pelaporan UPPKS sangat membantu untuk mengetahui perkembangan kelompok UPPKS. Karena menurut acuan normatif, dana KUKESRA diperuntukkan bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) yang tergabung dalam kelompok usaha/UPPKS dan memiliki tabungan TAKESRA serta tidak sedang menikmati atau menggunakan fasilitas kredit dari sumber lain. Selain itu keluarga atau kelompok yang bersangkutan harus memiliki kegiatan atau rencana usaha ekonomi produktif baik yang sedang berjalan ataupun yang selanjutnya akan dikembangkan sebagai sarana atau sumber penghasilan untuk pengembalian pinjaman KUKESRA.

Tetapi dalam kenyataanya ditemukan beberapa penyimpangan. Kasus di desa Kaligelang misalnya dimana ada satu orang Ketua Kelompok yang mengatasnamakan 14 kelompok fiktif berhasil mendapat pinjaman dalam jumlah yang besar dan digunakan untuk kepentingan sendiri. Tunggakan yang macet pada Ketua Kelompok Bugenvill desa Kaligelang itu mencapai nilai nominal kurang lebih 40 juta rupiah. Kasus lain di desa Beji Kecamatan Taman dimana setoran anggota Kelompok Sukamaju V dipakai dulu oleh Ketua Kelompok. Sebelum angsuran kelompok itu lunas Ketua Kelompok meninggal dunia. Sehingga sisa angsuran sebesar 3,16 juta rupiah belum dibayarkan ke Kantor Pos. Kasus-kasus seperti ini terjadi juga di desa-desa penerima KUKESRA lainnya.

Menurut Dunn (1998: 28) pemantauan atau monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan bagi pengambil kebijakan untuk mengetahui tingkat

kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari sebuah kebijakan atau program dan mengidentifikasi hambatan serta rintangan dalam implementasi.

Tabel IV. 30 Melaporkan Setiap Penyimpangan yang Terjadi

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Langsung melaporkan	54	84,38
Dimusyawarahkan	6	9,38
Tidak melapor	4	6,25
Lain-lain	-	-
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 31

Temuan pada tabel IV.30 itu ternyata jumlah responden yang melaporkan terjadinya penyimpangan adalah 54 orang atau 84,38% untuk kategori “langsung melaporkan” begitu ada penyimpangan. Sisanya sebanyak enam orang atau 9,38% baru melaporkan terjadinya penyimpangan setelah “dimusyawarahkan dulu” dengan anggota. Sedangkan yang lain sejumlah empat orang atau 6,25 % tidak melaporkan. Alasannya karena petugas PLKB yang akan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan oleh BKKBN kantor Kabupaten Pematang Jaya (2001:14) ternyata penyebab tunggakan KUKESRA berkaitan dengan aspek program maupun aplikasinya antara lain:

- Kredit tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok
- Pendekatan dilakukan secara seragam, tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik wilayah
- Penyiapan petugas dan kelompok kurang memadai
- Terbatasnya sumber daya pendukung (sarana, tenaga, dana dan pembinaan)
- Penyimpangan oleh petugas dan aparat desa

Kompleksnya penyebab tunggakan memerlukan penyelesaian yang bersifat komprehensif pula. BKKBN kantor Kabupaten Pemalang mengidentifikasi beberapa wujud tindakan perbaikan yang perlu ditempuh, yaitu:

- ♦ Penyempurnaan KUKESRA baik besarnya kredit maupun mekanisme penyalurannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok.
- ♦ Peningkatan kualitas kelompok UPPKS agar mampu mengembalikan kredit tepat waktu antara lain melalui pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis.
- ♦ Peningkatan promosi produk UPPKS guna meningkatkan jangkauan pemasaran.
- ♦ Penentuan sanksi administratif bagi petugas yang melakukan penyimpangan.

Tabel IV.31 Tindakan perbaikan atas penyimpangan KUKESRA

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Tagihan dan pembinaan	21	32,81
Tagihan saja	43	67,19
Pembinaan saja	-	-
Didiamkan saja	-	-
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 33

Temuan penelitian sebagaimana ditunjukkan oleh tabel IV.31 ternyata sebanyak 43 orang responden atau 67,19% mengatakan bahwa wujud tindakan perbaikan yang dilakukan atas penyimpangan yang terjadi adalah dengan melakukan “tagihan”. 21 orang responden atau 32,81% lainnya menjawab dengan melakukan “tagihan dan pembinaan”. Penyimpangan dimaksud disini adalah tunggakan dan atau salah sasaran.

Meskipun tidak ada sanksi hukum terhadap tunggakan, namun hal itu harus dihindari karena akan mengganggu kelancaran KUKESRA secara keseluruhan.

Adapun penyelesaian tunggakan dengan jalan tagihan dan pembinaan ditempuh melalui:

- Pada *tunggakan kuning* diharapkan melalui pembinaan kelompok keluarga penunggak dapat menyelesaikan tunggakannya dengan usahanya sendiri sebelum masa pinjaman berakhir.
- Pada *tunggakan merah* penyelesaian akan dilakukan oleh kelompok melalui prinsip-prinsip tanggung renteng, yaitu;
 - a). Kelompok yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan pinjaman baru sampai sisa pinjaman dibayar lunas.
 - b). Untuk contoh membayar sisa pinjaman antara lain dapat dilakukan dengan dibayar tunai secara gotong royong oleh anggota yang lain yang tergabung dalam suatu perjanjian kredit atau diusahakan adanya dukungan dan dari masyarakat setempat melalui bantuan desa.

Dampak yang didapat dari perbaikan (tagihan dan pembinaan) yang dilakukan dalam pengembalian dana KUKESRA, ternyata sebanyak 27 orang responden atau 42,19% menjawab bahwa mereka baru bisa mengangsur sedikit. “Angsuran masuk sedikit” artinya peminjam baru memberikan setoran pertama dan kedua dalam pengembalian kredit KUKESRA. Responden lainnya sebanyak sebelas orang atau 17,19% menjawab bahwa angsuran mereka hampir lunas. “Hampir lunas” disini berarti bahwa peminjam telah menyerahkan uang setoran KUKESRA minimal tiga kali angsuran. Sisanya sebanyak 26 responden atau 4,62% menjawab bahwa angsuran KUKESRA mereka “macet” total.

Tabel IV.32 Dampak perbaikan yang dilakukan dalam pengembalian dana KUKESRA

Kategori jawaban	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
Angsuran lunas	-	-
Angsuran hampir lunas	11	17,19
Angsuran masuk sedikit	27	42,19
Angsuran macet total	26	40,62
Total	64	100,00

Sumber: Diolah dari pertanyaan nomor 35

Pada tabel IV.32 di atas terlihat bahwa distribusi jawaban responden lebih merata. Tapi patut dicermati bahwa mayoritas responden 42,19% ternyata mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman KUKESRA. Sebagai sebuah deskripsi, umunya responden macet pada tahap IV. Perkembangan tunggakan KUKESRA itu sendiri masih cukup tinggi. Kondisi ini bisa jadi karena kewirausahaan yang menjadi “tiang” dari program KUKESRA itu masih rendah.

4.3 ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bagian ini akan mencoba menjelaskan analisis terhadap hasil penelitian. Analisis terbagi ke dalam empat sub bagian yang masing-masing mencoba menjelaskan keterkaitan antara variabel Sikap (X_1), Sumber Daya (X_2) dan Pengawasan (X_3) dengan variabel Implementasi Program KUKESRA (Y). Koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y dicari dengan menggunakan analisis regresi. Prosedur statistik yang ditempuh adalah dengan mencari koefisien regresi untuk mengetahui:

- Hubungan linear dan seberapa kuat variabel Sikap (X_1) mempengaruhi variabel Implementasi Program KUKESRA (Y).

- Hubungan linear dan seberapa kuat variabel Sumber Daya (X_2) mempengaruhi variabel Implementasi Program KUKESRA (Y).
- Hubungan linear dan seberapa kuat variabel Pengawasan (X_3) mempengaruhi variabel Implementasi Program KUKESRA (Y).
- Hubungan linear antara variabel Sikap (X_1), Sumber Daya (X_2) dan Pengawasan (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Implementasi Program KUKESRA (Y) dan seberapa kuat pengaruh tersebut.

Hasil pengujian hipotesis terhadap keempat variabel tersebut akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan tentang ada tidaknya hubungan antara variabel Sikap (X_1), Sumber Daya (X_2) dan Pengawasan (X_3) dengan variabel Implementasi Program KUKESRA (Y).

Sebelum dilakukan uji hipotesis untuk melihat keterkaitan antara variabel-variabel penelitian maka terlebih dahulu tabulasi silang untuk melihat hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Tabel IV. 33 mencoba menjelaskan hubungan antara variabel implementasi dengan variabel sikap.

Tabel IV.33 Tabulasi Silang (hubungan) antara variabel Implementasi dengan variabel Sikap

Variabel Implementasi	Variabel Sikap				Total
	Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
Sangat baik	1 2,4%	-	-	-	1 1,6%
Baik	18 43,9%	5 29,4%	4 100,0%	-	27 42,2%
Kurang baik	21 51,2%	8 47,1%	-	1 50,0%	30 46,9%
Tidak baik	1 2,1%	4 23,5%	-	1 50,0%	6 9,4%
Total	41 100,0%	17 100,0%	4 100,0%	2 100,0%	64 100,0%

Hasil tabulasi silang (tabel IV.33) antara variabel implementasi dengan variabel sikap menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi sikap semakin tinggi pula tingkat implementasi program. Hal ini tercermin dimana variabel sikap “baik” maka terdapat 29,4% yang menyatakan tingkat implementasi “baik” pula. Sementara mereka yang menyatakan sikap “kurang baik” maka terdapat 50% yang menyatakan bahwa implementasi “kurang baik” pula. Hasil ini telah memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan hubungan antara sikap dengan implementasi program KUKESRA.

Tabel IV.34 Tabulasi Silang (hubungan) antara variabel Implementasi dengan variabel Sumber Daya

Variabel Implementasi	Variabel Sumber Daya				Total
	Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
Sangat baik	-	-	-	1 1,9%	1 1,6%
Baik	-	6 66,7%	1 50,0%	20 38,5%	27 42,2%
Kurang baik	-	-	1 50,0%	29 55,8%	30 46,9%
Tidak baik	1 100,0%	3 33,3%	-	2 3,8%	6 9,4%
Total	1 100,0%	9 100,0%	2 100,0%	52 100,0%	64 100,0%

Hasil tabulasi silang (tabel IV. 34) antara variabel sumber daya dengan variabel implementasi program KUKESRA menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin rendah tingkat sumber daya maka akan semakin rendah pula tingkat implementasi program. Hal ini tercermin dimana variabel sumber daya “kurang baik” maka terdapat 50,0% yang menyatakan tingkat implementasi “kurang baik” pula. Sementara mereka yang menyatakan bahwa

sumber daya dianggap “baik” maka terdapat 66,7% yang menyatakan bahwa implementasi “baik” pula. Hasil ini telah memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan hubungan antara sumber daya dengan implementasi program KUKESRA. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ternyata sumber daya ini sangat rendah atau “kurang baik”. Hal ini boleh jadi karena frekuensi pelatihan kewirausahaan yang dijalani responden sangat minim.

Tabel IV.35 Tabulasi Silang (hubungan) antara variabel Implementasi dengan variabel Pengawasan

Variabel Implementasi	Variabel Pengawasan				Total
	Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
Sangat baik	1 14,3%	-	-	-	1 1,6%
Baik	2 28,6%	19 45,2%	3 30,0%	3 60,0%	27 42,2%
Kurang baik	4 57,1%	21 50,0%	5 50,0%	-	30 46,9%
Tidak baik	-	2 4,8%	2 20,0%	2 40,0%	6 9,4%
Total	7 100,0%	42 100,0%	10 100,0%	5 100,0%	64 100,0%

Hasil tabulasi silang (tabel IV. 35) antara variabel pengawasan dengan variabel implementasi program KUKESRA menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat pengawasan maka akan semakin semakin tinggi pula tingkat implementasi program KUKESRA. Hal ini tercermin dimana variabel pengawasan “baik” maka terdapat 45,2% yang menyatakan bahwa tingkat implementasi “baik” pula. Sementara mereka yang menyatakan bahwa pengawasan dianggap “kurang baik” maka terdapat 50,0% yang menyatakan bahwa implementasi “kurang baik” pula.

4.3.1 Hubungan antara Sikap dengan Implementasi Program KUKESRA

Ho: Tidak ada hubungan antara Sikap dengan Implementasi Program KUKESRA

Ha: Ada hubungan antara Sikap dengan Implementasi Program KUKESRA

Tabel IV.36 Ringkasan Pengujian Hipotesis Minor 1

N	r	r ²	df	α	F Hitung	F Tabel
64	0,279	0,078	1,62	5%	5,241	4,00

Sumber: Diolah dari perhitungan statistik SPSS 10 for Windows

Perhitungan statistik yang dilakukan komputer menghasilkan angka-angka statistik yang diperlukan dalam analisis. Namun tidak seluruh angka-angka statistik yang dihasilkan itu dipakai, tetapi hanya sebagian saja. Koefisien korelasi yang didapat dari perhitungan statistik di atas adalah $r = 0,279$.

Pengujian terhadap tingkat signifikansi koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nilai-nilai ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (variabel Sikap) berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan nilai variabel dependen (Implementasi Program KUKESRA). Dari perhitungan di atas dengan α sebesar 5%, ternyata didapat nilai kritis (F tabel) sebesar 4,000. Sedangkan nilai F hasil perhitungan (F hitung) adalah 5,241. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka koefisien korelasi itu signifikan. Keputusannya adalah menolak Ho. Artinya secara statistik terdapat hubungan antara Sikap dengan Implementasi Program KUKESRA.

Mengacu kepada pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:216) maka nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,279 tergolong dalam kategori hubungan yang rendah.

Adapun koefisien determinasi (r^2) yang didapat adalah 0,078. Artinya pengaruh variabel Sikap terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA adalah 7,8%. Sisanya sebesar 92,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sikap.

4.3.2 Hubungan antara Sumber Daya dengan Implementasi Program KUKESRA

Ho: Tidak ada hubungan antara Sumber Daya dengan Implementasi Program KUKESRA

Ha: Ada hubungan antara Sumber Daya dengan Implementasi Program KUKESRA

Tabel IV.37 Ringkasan hasil pengujian Hipotesis Minor 2

N	R	r^2	Df	α	F hitung	F tabel
64	0,161	0,026	1,62	5%	1,645	4,000

Sumber: Diolah dari perhitungan SPSS 10 for Windows

Koefisien korelasi (r) yang didapat dari perhitungan statistik di atas adalah 0,161. Untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien korelasi, maka diadakan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Ternyata dengan *degree of freedom* (df) 1,62 pada $\alpha = 5\%$ didapat nilai F tabel 4,000. Padahal nilai F hasil perhitungan statistik (F hitung) adalah 1,645. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka koefisien korelasi itu tidak signifikan. Keputusannya adalah menerima

Ho. Artinya secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Sumber Daya dengan variabel Implementasi Program KUKESRA.

Mengacu kepada pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:216) maka nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,161 tergolong dalam kategori hubungan yang sangat rendah.

Adapun nilai koefisien determinasi (r^2) adalah 0,026. Artinya pengaruh variabel Sumber Daya terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA adalah 2,6%. Sisanya sebesar 97,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sumber Daya.

4.3.3 Hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Program KUKESRA

Ho: Tidak ada hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Program KUKESRA.

Ha: Ada hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Program KUKESRA

Tabel IV.38 Ringkasan Pengujian Hipotesis Minor 3

N	R	r^2	df	α	F hitung	F tabel
64	0,326	0,106	1,62	5%	7,380	4,000

Sumber: Diolah dari perhitungan SPSS 10 for Windows

Koefisien korelasi (r) yang didapat dari perhitungan statistik di atas adalah 0,326. Untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien korelasi, maka diadakan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Ternyata nilai F tabel dengan *degree of freedom* (df) 1,62 pada α sebesar 5% adalah 4,000. Sedangkan nilai F hasil perhitungan statistik (F hitung) adalah 7,380. Karena nilai F hitung lebih besar

daripada nilai F tabel, maka koefisien korelasi itu signifikan. Keputusannya adalah menolak H_0 . Artinya secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Pengawasan dengan variabel Implementasi Program KUKESRA.

Mengacu kepada pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi (r) sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002: 216) maka nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,326 tergolong dalam kategori hubungan yang rendah.

Adapun nilai koefisien determinasi (r^2) adalah 0,106. Artinya pengaruh variabel Pengawasan terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA adalah 10,6%. Sisanya sebesar 80,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain Pengawasan.

4.3.4 Hubungan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama dengan Implementasi Program KUKESRA

H_0 : Tidak ada hubungan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama dengan Implementasi Program KUKESRA.

H_a : Ada hubungan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama dengan Implementasi Program KUKESRA

Tabel IV.39 Ringkasan Pengujian Hipotesis Mayor

N	r	r²	Df	α	F hitung	F tabel
64	3,63	0,132	3,60	5%	3,034	2,76

Sumber: Diolah dari perhitungan statistik SPSS 10 for Windows

Nilai koefisien korelasi (r) yang didapat dari perhitungan statistik di atas adalah 3,63. Pengujian terhadap tingkat signifikansi koefisien korelasi ditempuh

dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Ternyata nilai F tabel dengan *degree of freedom* (df) 3,60 pada α sebesar 5% adalah 2,76. Sedangkan nilai F hasil perhitungan statistik (F hitung) adalah 3,034. Karena nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka koefisien korelasi itu signifikan. Keputusannya adalah menolak H_0 . Artinya secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama dengan variabel Implementasi Program KUKESRA.

Mengacu kepada pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi (r) sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:216) maka nilai koefisien korelasi (r) sebesar 3,63 tergolong dalam kategori hubungan yang rendah.

Adapun koefisien determinasi (r^2) yang didapat adalah 0,132. Artinya pengaruh variabel Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA adalah 13,2%. Sisanya sebesar 86,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan.

4.4 Diskusi

Bagian ini akan memberikan pembahasan terhadap hasil pengujian hipotesis atau penjelasan atas pemecahan masalah. Untuk melihat seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel penelitian, penulis merangkumnya dalam tabel IV.40.

Tabel IV.40 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hubungan antar Variabel	Pengujian Terhadap Ho	Arti	Nilai r	Arti Nilai
1	X ₁ – Y	Ditolak	Ada hubungan signifikan	0,279	Rendah
2	X ₂ – Y	Diterima	Tidak ada hubungan signifikan	0,161	Sangat Rendah
3	X ₃ – Y	Ditolak	Ada hubungan signifikan	0,326	Rendah
4	X – Y	Ditolak	Ada hubungan signifikan	0,363	Rendah

Catatan: Kategori nilai koefisien korelasi (r) didasarkan pada pedoman dari Sugiyono (2002:216).

Dari tabel IV.40 di atas terlihat bahwa untuk hipotesis minor 1 diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,279 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Sikap dengan Implementasi Program KUKESRA adalah rendah.

Penolakan terhadap Ho menunjukkan bahwa sikap resipien Program KUKESRA memiliki hubungan yang rendah dengan implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Namun demikian hubungan ini cukup berarti (signifikan) untuk mempengaruhi kondisi implementasi program.

Dari sisi kognitif, resipien umumnya memiliki pengetahuan tentang tujuan dan sasaran program KUKESRA. Tujuan dan sasaran program KUKESRA adalah membantu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk meningkatkan tahapan keluarga sejahtera melalui usaha ekonomi produktif. Adapun dari sisi afektif penerimaan resipien terhadap program KUKESRA tergolong positif. Resipien merasa senang terhadap keberadaan program. Sementara dari sisi konatif

(kecenderungan berperilaku) resipien juga mendukung program. Artinya mereka bersedia hadir dalam penyuluhan-penyuluhan KUKESRA. Dengan demikian pada variabel Sikap menunjukkan adanya konsistensi dengan program KUKESRA.

Permasalahan muncul ketika diadakan penggalan mengenai informasi yang berkaitan dengan variabel Sumber Daya. Acuan normatif yang mengharuskan adanya pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok KUKESRA ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam ketentuan BKKBN (1994: 13) disebutkan bahwa penyiapan kelompok UPPKS secara matang akan memberikan sumbangan pada kegiatan selanjutnya. Dalam rangka penyiapan UPPKS semestinya dilaksanakan kegiatan pematangan kelompok, pelatihan dasar dan pembinaan pasca pelatihan.

Pematangan kelompok merupakan langkah awal dari suatu proses pelatihan UPPKS dan dilakukan dengan cara atau melalui penerapan teknis dinamika kelompok. Bila pematangan kelompok sudah memadai maka diteruskan dengan pelaksanaan pelatihan. Pelatihan UPPKS terdiri dari empat tahap secara berurutan: tahap identifikasi potensi, tahap pelatihan dasar *Achievement Motivation Training* (AMT), tahap pelatihan dasar pengelolaan UPPKS dan tahap pelatihan teknis keterampilan wirausaha. Mengingat keberhasilan pelatihan akan bermuara pada kegiatan-kegiatan UPPKS maka diperlukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengetahui permasalahan yang dihadapi kelompok. Kelompok yang belum siap dan belum matang, diprogramkan untuk mengikuti magang dan dibina oleh kelompok UPPKS yang berhasil.

Minimnya frekuensi pengadaan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan boleh jadi menjadi kontributor utama dalam macetnya usaha ekonomi produktif yang

dilakukan oleh resipien KUKESRA. Apabila ditelusuri secara kualitatif ternyata sebagian besar responden mengaku bahwa tunggakan KUKESRA mereka macet pada tahap IV. Kondisi ini mengindikasikan bahwa angsuran KUKESRA tahap I sampai dengan III relatif lancar. Namun sejak memasuki tahun 1998 rata-rata responden mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman.

Hasil yang didapat dari pengujian hipotesis minor 2 membuktikan bahwa keterkaitan antara sumber daya dengan implementasi ;program KUKESRA sangat rendah yaitu $r = 0,161$ dengan tingkat kepercayaan 95 % dan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi kondisi variabel implementasi program KUKESRA. Temuan memunculkan tanda tanya ; mengapa tidak ada kaitan? Mengacu kepada temuan di lapangan jelas terlihat bahwa sebagian besar responden (81,25%) tidak pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Padahal kewirausahaan merupakan “ tiang penyangga “ bagi keberlangsungan program KUKESRA agar dapat meningkatkan tahapan keluarga sejahtera resipiennya.

Adapun hasil pengujian hipotesis minor 3 menunjukkan bahwa koefisien korelasi (r) antara variabel pengawasan dengan variabel Implementasi program KUKESRA adalah 0, 326 dengan tingkat kepercayaan 95%. Koefisien korelasi ini tergolong rendah (Sugiyono, 2002: 216) namun signifikan. Adapun koefisien determinasi yang didapat adalah (r^2) 0,106. Artinya pengaruh variabel pengawasan terhadap variabel implementasi program KUKESRA adalah 10,6%. Sisanya sebesar 80,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain pengawasan.

Apabila dibandingkan dengan koefisien korelasi maupun koefisien determinasi yang diberikan oleh variabel bebas lainnya dalam penelitian ini, ternyata

sumbangan yang diberikan oleh variabel pengawasan adalah yang paling tinggi. Ini artinya perubahan kondisi pada variabel pengawasan akan berdampak signifikan pada kondisi variabel implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Permasalahannya adalah bahwa sanksi hukum terhadap para pelanggar KUKESRA masih sangat lemah. Kondisi ini boleh jadi mengakibatkan ketidakdisiplinan pengurus, anggota maupun petugas PLKB sendiri dalam mengelola program KUKESRA. Sebagaimana diketahui bahwa wewenang yang dimiliki oleh BKKBN adalah dalam hal pembinaan. Sedangkan pengawasan merupakan bagian dari tugas Bank BNI. Namun hingga saat ini mekanisme yang lazim terjadi pada dunia perbankan dengan menyeret para penunggak hutang ke jalur hukum belum dilaksanakan. Sehingga akhirnya muncul asumsi keliru di masyarakat bahwa kredit KUKESRA adalah *uang rezim Suharto* yang tidak perlu dikembalikan.

Responden mengakui bahwa ketidakpastian sosial ekonomi masyarakat waktu itu sangat berdampak pada kelancaran usaha. Para pedagang bahkan mengakui keuntungan usaha yang didapat sangat minim. Tidak sebanding dengan modal usaha. Sebagai contoh adalah yang dialami Ibu Saidah (55 tahun) anggota kelompok KUKESRA desa Pedurungan Kecamatan Taman. Sebelum terjadinya gelombang reformasi pada tahun 1998 usaha loteknya bisa menarik keuntungan bersih Rp. 100.000,- per hari. Namun sejak reformasi bergulir diikuti dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat sepi pembeli. Sehingga jumlah keuntungan semakin kecil dan akhirnya bankrut.

Ibu Saidah tidak sendiri. Ibu Fatonah (45 tahun) Kader/ Ketua kelompok KUKESRA desa Beji Kecamatan Taman bahkan mengalami nasib lebih buruk. Usaha dagang kain yang digelutinya sejak tahun 1996 dengan bantuan modal KUKESRA akhirnya bangkrut dan kini berjualan lotek. Dulu sekitar tahun 1996-1997 menurut Ibu fatonah usaha dagang kainnya mampu meraup keuntungan lebih dari dua juta rupiah setiap bulan. Namun sejak krisis ekonomi melanda jumlah pembeli semakin menurun. Belum lagi adanya pembeli nakal yang telah melakukan penipuan sehingga merugi sampai lima juta rupiah (observasi, 2002).

Minimnya frekuensi pengadaan pelatihan dan kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan mendorong resipien untuk memanfaatkan dana KUKESRA bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtifnya. Dari persebaran kusioner pada responden terlihat bahwa sebanyak 29,69% responden tidak memiliki usaha produktif yang jelas. Sehingga pengelolaan dana KUKESRA pun menjadi tidak jelas. Dalam kasus-kasus terakhir bahkan ditemukan bahwa uang angsuran KUKESRA ternyata dipakai untuk hal-hal yang jauh dari usaha ekonomi produktif, misalnya untuk biaya anak sekolah, resepsi pernikahan , pencalonan pamong desa dan lain-lain. (observasi, 2002)

Secara bersama-sama keterkaitan yang dimiliki antara variabel Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan dengan variabel Implementasi Program KUKESRA ternyata juga tergolong rendah. Koefisien korelasi (r) yang ditemukan adalah sebesar 0,363. Nilai ini cukup signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun koefisien determinasi yang didapat adalah (r^2) sebesar 0,132. Artinya pengaruh variabel Sikap, Sumber daya dan Pengawasan secara bersama-sama terhadap

perubahan variabel Implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah 13,2% . Sedangkan sisanya sebesar 86,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan.

Apabila diamati ternyata ada beberapa determinan lain yang turut mempengaruhi kondisi implementasi program KUKESRA. Variabel bebas lain itu adalah situasi politik dalam negeri. Sebagaimana diakui oleh Kepala BKKBN Kantor Kabupaten Pemalang Drs. Prasetyo Adhi bahwa pengadaan program KUKESRA memiliki nuansa politis yang tinggi. Sehingga ketika situasi politik bergejolak, maka perkembangan kelompok-kelompok KUKESRA pada masyarakat *akar rumput* ikut terkena imbasnya. Temuan ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab, 1997: 81) bahwa kondisi sosial politik ikut menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.

Di sisi lain pada pengelolaan program KUKESRA terasa bahwa strategi “kejar target” yang pernah ditempuh pada awal-awal tahun pertama KUKESRA ternyata memunculkan banyak masalah. Fenomena kelompok-kelompok fiktif, dan anggota-anggota kelompok yang tidak memiliki jenis usaha yang jelas pada gilirannya memberi sumbangan pada tingginya angka tunggakan KUKESRA. Sehingga sebagai implikasi praktisnya BKKBN perlu untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Mengingat kompleksnya berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi program KUKESRA di lapangan maka penanganannya pun bersifat kompleks pula. Beberapa alternatif yang bisa dilakukan antara lain dengan revisi kebijakan. Revisi kebijakan dimaksud adalah memprioritaskan pelaksanaan KUKESRA Mandiri tanpa mengabaikan penanganan terhadap tunggakan KUKESRA

yang ada. Kepada kelompok-kelompok usaha yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktifnya perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Juga tidak menutup kemungkinan untuk memperbesar jumlah pinjaman KUKESRA, mengingat konteks sosial ekonomi masyarakat yang mulai berubah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai sintesis atau generalisasi atas pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap dengan Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Pengujian hipotesis yang dilakukan melalui analisis regresi dengan bantuan SPSS 10 for Windows menemukan bahwa koefisien korelasi (r) adalah 0,279. Mengacu pada pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi (r) sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:216) maka koefisien korelasi (r) sebesar 0,279 tergolong dalam kategori hubungan yang rendah. Adapun nilai koefisien determinasi (r^2) adalah 0,078. Artinya pengaruh variabel Sikap terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah 7,8%. Sedangkan sisanya sebesar 92,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sikap. Terbukti bahwa sikap resipien yang kurang mendukung program ternyata memberi kontribusi pada ketidakberhasilan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Sumber Daya dengan Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Pengujian hipotesis melalui analisis regresi dengan bantuan SPSS

10 for Windows menemukan bahwa nilai koefisien korelasi (r) adalah 0,161. Mengacu pada pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi (r) sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:216) maka nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,161 tergolong dalam kategori hubungan yang sangat rendah. Adapun nilai koefisien determinasi (r^2) yang didapat adalah 0,026. Artinya pengaruh variabel Sumber Daya terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah 2,6%. Sisanya sebesar 97,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sumber Daya. Ternyata rendahnya sumber daya yang tersedia bagi program KUKESRA berupa minimnya frekuensi pengadaan pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis mengenai kewirausahaan memberi kontribusi pada ketidakberhasilan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara Pengawasan dengan Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Pengujian hipotesis yang dilakukan melalui analisis regresi dengan bantuan SPSS 10 for Windows menemukan bahwa koefisien korelasi (r) adalah 0,325. Mengacu pada pedoman untuk memberikan interpretasi atas nilai koefisien korelasi (r) sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:216) maka koefisien korelasi (r) sebesar 0,326 tergolong dalam kategori hubungan yang rendah. Adapun koefisien determinasi (r^2) adalah 0,106. Artinya pengaruh variabel Pengawasan terhadap variabel Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah 10,6%. Sisanya sebesar

80,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain Pengawasan. Ternyata pengawasan yang lemah mengakibatkan terjadinya ketidakberhasilan implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama dengan Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Pengujian hipotesis melalui analisis regresi dengan bantuan SPSS 10 for Windows menemukan bahwa koefisien korelasi (r) adalah 0,363. Mengacu pada pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi (r) sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:216) maka nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,363 tergolong dalam kategori hubungan yang rendah. Adapun nilai koefisien determinasi (r^2) adalah 0,132. Artinya pengaruh variabel Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama terhadap Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah sebesar 13,2%. Sedangkan sisanya sebesar 86,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan secara bersama-sama dengan Implementasi program KUKESRA tidak terlalu menonjol. Di pihak lain ternyata justru terdapat faktor-faktor yang diduga lebih dominan dalam mempengaruhi implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu kondisi sosial politik dan ekonomi dalam negeri.

Akhirnya terdapat dua hal pokok yang menjadi temuan penelitian ini. **Pertama**, dari sisi Ilmu Administrasi Publik semakin menguatkan teori tentang hubungan antara Sikap, Sumber Daya dan Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan. **Kedua**, dari sisi empirik sesuai dengan topik penelitian Implementasi Program KUKESRA, penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang masih rendah. Kondisi ini tercermin dari tingginya tunggakan KUKESRA pada resipien (masyarakat penerima program) KUKESRA tanpa didukung dengan usaha ekonomi produktif yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian penyebab tunggakan itu berkaitan dengan aspek program maupun implementasinya, antara lain:

- Kredit tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok.
- Pendekatan dilakukan secara seragam, tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik wilayah.
- Penyiapan petugas dan kelompok kurang memadai.
- Terbatasnya sumber daya pendukung (sarana, tenaga, dana dan pembinaan).

5.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian di atas maka berikut ini diajukan beberapa saran:

1. Mengingat kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang maka BKKBN selaku organisasi pelaksana perlu melakukan beberapa perbaikan.

Pertama, dari sisi Sikap. Mereka yang tergabung dalam kelompok UPPKS pada umumnya masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dan belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman sehingga perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain sosialisasi kegiatan UPPKS, pelatihan keterampilan, penyediaan kredit yang sesuai dan pendampingan. **Kedua**, dari sisi Sumber Daya. Dalam rangka meningkatkan kualitas kelompok maka perlu dilakukan:

- Penyempurnaan KUKESRA baik besarnya kredit maupun mekanisme penyalurannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok.
- Peningkatan kualitas kelompok UPPKS agar mampu mengembalikan kredit tepat waktu antara lain melalui pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis. Upaya pendampingan dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitator yang berasal dari berbagai institusi yang dianggap mampu melaksanakan peran tersebut seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Selain itu perlu juga diadakan peningkatan promosi produk UPPKS guna meningkatkan jangkauan pemasaran.

Ketiga, dari sisi Pengawasan. Perlu diadakan pengawasan represif berupa sanksi hukum kepada para pelanggar KUKESRA. Hal ini perlu mengingat ketidakdisiplinan dalam pengelolaan program, salah satu diantaranya adalah karena lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) bagi para pelanggar KUKESRA.

2. Sebagai umpan balik bagi pengambil kebijakan, penelitian ini merekomendasikan adanya revisi kebijakan atas program KUKESRA,

misalnya dengan memberi prioritas kepada program KUKESRA Mandiri. Tentu saja dengan tidak mengabaikan penanganan terhadap tunggakan KUKESRA yang ada dan dukungan kemitrausahaan.

3. Pemerintah perlu mempertimbangkan potensi daerah dan perluasan kesempatan kerja sebelum memformulasikan kebijakan baru dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini penting agar kegagalan-kegagalan yang pernah dialami oleh program-program Pengentasan kemiskinan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUT (Kredit Usaha Tani), KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) dan lain-lain tidak terulang.
4. Bagi para peneliti lanjutan yang masih berminat untuk meneliti Implementasi Program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang disarankan agar lebih memfokuskan pada pengaruh variabel sosial politik dan ekonomi terhadap implementasi. Hal ini mengingat temuan dilapangan menunjukkan adanya indikasi bahwa variabel-variabel tersebut lebih dominan mempengaruhi implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000. *Analisis Regresi*. Yogyakarta. STIE BPFE
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- _____. 1988. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kantor Kabupaten Pemalang, 2001. *Materi rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional kabupaten Pemalang tahun 2001*. Pemalang
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah. 1996. *Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA) Bagi Kader*. Semarang
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2001. *Statistik Indonesia 2000*. Jakarta
- Buchori, Imam. 1977. *Administrasi Negara*. Jakarta. LAN
- Cokroaminoto, Bintoro. 1988. *Pengawasan Melekat Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung
- Djamaluddin, Ancok. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial Public Relation*. Jakarta. PT. Bina Rena
- Dunn, William. N. 1992. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan pertama. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Dunn. William. N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, A. 1994. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Universitas Gadjah Mada
- Eaton, Josep. W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*. Penerjemah: Pandam Guritno dan Aldi Jeni. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press

- Handayaniingrat, Soewarno. 1983. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Hoogerwerf, A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Islamy, Irfan. 1986. *Analisis Implementasi Kebijakan*. Jakarta. Bina Aksara
- Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Pos Indonesia (Persero) dan Yayasan dana Sejahtera Mandiri. 1997. *Petunjuk Bersama Pelaksanaan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA)*. Edisi II. Jakarta
- Komaruddin. 1985. *Pengantar Untuk Memahami Pembangunan*. Bandung. Angkasa.
- Korten, David C. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Mustopadidjaja. 2000. *Manajemen Proses Kebijakan*. Jakarta. LAN
- Quade. E.S. 1984. *Analysis for Public Decision*. Second Edition, fourth printing. New York. Elsevier Science Publishing
- Rakhmat, Jalaludin. 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Silalahi, Ulbert. 1999. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Negara (Konsep, Teori dan Dimensi)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Singarimbun, Masri. Dkk. 1981. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi Pertama. Jakarta. Mustika Jaya
- Soetarto. 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- _____. 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Suparmoko. 1991. *Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi)*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Thoha, miftah. 1993. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi (Suatu Bunga Rampai Bacaan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Uchjana, Onong. 1981. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung. Alumni

Wastra, Pariata. 1992. *Pokok-Pokok Pengertian Manajemen*. Yogyakarta:UGM BPA

Wibawa, Samodra. 1992. *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty

Winardi. 1983. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.